

INFLASI DI INDONESIA : KARAKTERISTIK DAN PENGENDALIANNYA

Tim Penulis¹

G.A. Diah Utari
Retni Cristina S.
Sudiro Pambudi

**BANK INDONESIA INSTITUTE
2015**

¹ Penulis adalah Peneliti di Bank Indonesia Insitute. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr Sugeng, Kepala BI Institute, Sdri Diana Permatasari dari Divisi Inflasi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter dan Sdr. Handri Adiwilaga dari Divisi Asesmen Ekonomi Regional Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter atas masukan dan kontribusi bahan dalam penyusunan buku ini. Tulisan dalam buku ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

**UTARI, G.A. Diah ; CRISTINA, Retni ;
PAMBUDI, Sudiro**

Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan
Pengendaliannya / G.A. Diah Utari,
Retni Cristina S, Sudiro Pambudi. -- Jakarta
: BI Institute, 2016

i-viii, 64 hlm.; 15,2 cm x 22,8 cm. -- (Seri
Kebanksentralan ; 23)

Bibliografi: hlm. 62
ISSN 2528-1933

Sambutan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia Institute, kembali menerbitkan buku seri kebankesentralan. Penerbitan buku ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004 dan No. 6 tahun 2009, yaitu dalam rangka meningkatkan transparansi kepada masyarakat luas. Selain itu penerbitan Buku Seri Kebanksentralan ini diharapkan dapat membantu mensosialisasikan BI kepada masyarakat luas, sehingga publik akan lebih memahami tugas Bank Indonesia

Buku Seri Kebanksentralan “Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Upaya Pengendaliannya” merupakan kelanjutan dari BSK mengenai Inflasi yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Tahun 2009. Melengkapi edisi sebelumnya, buku ini mengulas mengenai karakteristik dan determinan inflasi di Indonesia serta upaya pengendaliannya baik dengan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia maupun melalui koordinasi kebijakan dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah. Koordinasi menjadi kata kunci dalam pengendalian inflasi di Indonesia mengingat sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia tetapi juga dari sisi penawaran di sektor riil.

Bank Indonesia, berupaya menuangkan bahasan materi buku seri kebankesentralan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Kami berharap penerbitan buku Seri Kebanksentralan ini dapat memperkaya khazanah ilmu kebankesentralan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. Kami mengharapkan saran dari berbagai pihak guna perbaikan selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat dan selamat membaca.

Jakarta, Juni 2016
Bank Indonesia Institute

Dr. Sugeng

Direktur Eksekutif

Pengantar

Inflasi merupakan fenomena moneter yang selalu menjadi perhatian utama bank sentral atau otoritas moneter. Pasalnya, inflasi yang tidak terkendali akan menggerus daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga kesejahteraan masyarakat menurun. Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan tugas penting yang diemban bank sentral atau otoritas moneter dalam mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara umum, setiap negara menginginkan terciptanya laju inflasi yang rendah dan stabil. Bank sentral dapat mengendalikan inflasi dari sisi permintaan agregat, yaitu dengan kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar. Namun, kebijakan yang dapat memengaruhi sisi permintaan agregat tidak hanya berasal dari kebijakan moneter, tetapi juga dari kebijakan fiskal (pemerintah), seperti kebijakan perpajakan dan kebijakan terkait pengeluaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara otoritas moneter dan otoritas fiskal harus terus dilakukan agar permintaan agregat dapat dikelola dengan baik. Selain itu, inflasi juga dapat bersumber dari sisi penawaran agregat. Kelangkaan barang dan jasa di tengah tingginya permintaan masyarakat dapat mendorong laju inflasi yang berlebihan. Ketersediaan barang dan jasa dalam jumlah yang memadai di tempat yang membutuhkan juga merupakan tantangan dalam pengendalian inflasi.

Buku ini memberikan ulasan singkat tentang teori dan praktek terkait inflasi dan pengendaliannya. Buku ini mencakup konsep dan teori inflasi yang akan memberikan pemahaman bagi pembaca tentang dasar-dasar pengetahuan yang melandasi pentingnya pengendalian inflasi. Untuk menunjang pemahaman tersebut, buku ini juga mengulas tentang inflasi yang terjadi di Indonesia dan upaya pengendaliannya. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah

dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI), baik di tingkat pusat maupun daerah (TPID), juga diulas di dalam buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat, dan selamat membaca.

Jakarta, Desember 2015

Penulis

Daftar Isi

PENGANTAR.....	iv
1. PENDAHULUAN.....	1
2. KONSEP DAN TEORI INFLASI	4
2.1. Pengertian Inflasi	4
2.2. Pengukuran Inflasi	5
2.3. Teori Inflasi	8
2.4. Komponen Inflasi.....	15
2.5. Dampak Inflasi.....	20
3. INFLASI DI INDONESIA.....	24
3.1. Pengukuran Inflasi di Indonesia.....	24
3.2. Dinamika & Karakteristik Inflasi di Indonesia.....	28
3.3. Inflasi Daerah.....	35
3.4. Determinan Inflasi Indonesia.....	37
4. PENGENDALIAN INFLASI DI INDONESIA	44
4.1. Kebijakan Moneter untuk Pengendalian Inflasi.....	44
4.2. Metode Penetapan Sasaran Inflasi di Indonesia.....	46
4.3. Tantangan Pengendalian Inflasi	49
4.4. Mekanisme Kerja Pengendalian Inflasi	52
4.5. Hasil Koordinasi Pengendalian Inflasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	62

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Keranjang IHK.....	25
Tabel 3.2 Struktur Pengelompokan IHK.....	26

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Interaksi Kurva Permintaan dan Penawaran Uang	9
Gambar 2.2 Dampak Kebijakan Moneter Bank Sentral	10
Gambar 2.3 Disagregasi Inflasi.....	15
Gambar 3.1 Bobot Inflasi di Indonesia Per Kawasan	28
Gambar 4.1 Alur Penetapan Sasaran Inflasi.....	48
Gambar 4.2 Koordinasi Pengendalian Inflasi	53
Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah TPID.....	54
Gambar 4.4 Mekanisme Koordinasi (Skema TPI-Pokjanas TPID)	57

Daftar Grafik

Grafik 3.1 Dinamika Inflasi IHK Indonesia.....	29
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi IHK 2008-2015	32
Grafik 3.3. Pergerakan Inflasi Inti Periode 2002-2015	33
Grafik 3.4 Pergerakan Inflasi <i>Volatile Food</i> Periode 2002-2015	34
Grafik 3.5 Pergerakan Inflasi <i>Administered Price</i> Periode 2002-2015	35
Grafik 3.6 Dinamika Inflasi Daerah Indonesia Per Kawasan Periode 2008-2015	36
Grafik 3.7 Rerata Inflasi Negara ASEAN-5 Sebelum dan Sesudah Krisis 1997/1998.....	38

Halaman ini sengaja dikosongkan

1. PENDAHULUAN

Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, tingkat pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup tetapi harus dibarengi dengan pemerataan (*inclusiveness*).

Inclusiveness memiliki berbagai definisi namun terdapat beberapa poin penting yang terkandung di dalamnya.² Pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif ketika pertumbuhan tersebut dapat menjangkau sektor di mana golongan berpendapatan rendah bekerja dan tinggal (misalnya, pertanian di daerah terbelakang), menggunakan faktor produksi *unskilled labor*; dan dapat menjaga harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah. Dari definisi ini, maka ketersediaan barang dan jasa serta keterjangkauan harga bagi masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, menjadi sangat penting. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat harus didukung dengan inflasi yang rendah dan stabil.

Pada tingkat yang rendah dan stabil, inflasi memberikan efek positif bagi perekonomian. Konsumen akan lebih mudah melakukan perencanaan konsumsi dan tergerak menabung karena daya beli tidak akan tergerus oleh inflasi. Inflasi yang rendah umumnya dibarengi suku bunga yang rendah, sehingga mendorong dunia usaha berinvestasi untuk peningkatan produksi yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi menimbulkan ketidakpastian sehingga mengurangi insentif untuk investasi dan konsumsi serta menggerus daya saing ekspor domestik. Inflasi yang tinggi juga menjadi masalah sosial karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat kelas bawah merupakan golongan yang paling rentan terhadap inflasi karena pergerakan upah mereka relatif lambat. Karena itu, tak mengherankan jika sering terjadi aksi buruh menuntut kenaikan upah, karena kenaikan upah tidak bisa mengejar kenaikan inflasi. Dengan melihat dampak negatif inflasi yang tinggi tersebut, maka target untuk menciptakan inflasi yang rendah dan stabil hampir pasti menjadi tujuan dari setiap Pemerintah yang berkuasa.

2 Menurut UNDP's chief economist, Thangavel Palanivel (2015)

Inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai ketika berbagai hambatan yang berkontribusi atas terciptanya inflasi dapat diminimalkan. Kendala dan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah, di antaranya, adalah biaya distribusi yang tinggi, rendahnya efisiensi produksi, dan akses pembiayaan yang mahal. Selain itu, faktor struktur pasar yang tidak sempurna, juga turut memicu kenaikan harga barang.³ Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya memengaruhi daya saing produk domestik.

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Bank Indonesia), maka tugas pokok Bank Indonesia (BI) adalah menjaga kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah dalam pengertian ini adalah terhadap barang dan jasa yakni inflasi dan kestabilan terhadap nilai tukar negara lain. Untuk melakukan tugas tersebut, BI melakukan kebijakan moneter yaitu mengendalikan jumlah uang beredar yang merupakan besaran moneter.

Dalam kenyataannya, inflasi di Indonesia, sebagaimana pula di negara berkembang lainnya, tidak hanya merupakan fenomena moneter saja tetapi juga banyak dipengaruhi oleh permasalahan struktural di sisi *supply*. Karena itu, upaya mengendalikan inflasi tidak cukup hanya dilakukan dengan instrumen moneter saja yang umumnya bersifat jangka pendek, tetapi juga harus disertai pembenahan di sektor riil guna mengeliminasi hambatan-hambatan struktural yang ada dalam perekonomian nasional. Diperlukan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan inflasi yang rendah dan stabil. Mengingat pentingnya pengelolaan inflasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkualitas, maka pemahaman inflasi di Indonesia oleh para pemangku kebijakan sangat penting. Dengan pemahaman yang sama diharapkan upaya pengendaliannya bisa dilakukan dengan lebih efektif.

3 Prastowo dkk(2010) menyatakan terdapat beberapa faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku pembentukan harga, khususnya produk manufaktur, yaitu faktor struktur pasar yang cenderung terkonsentrasi dan dugaan terjadinya *tacit collusion*, serta marjin keuntungan yang relatif besar. Sementara untuk pembentukan harga komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor siklus tanam/panen dan faktor alam.

Diktat pengajaran ini disusun sebagai salah satu referensi dalam pengajaran Kebanksentralan di tingkat dasar dan merupakan pengkinian atas Buku Seri Kebanksentralan (BSK) mengenai inflasi.⁴ Diktat ini mengulas mengenai konsep dasar inflasi, karakteristik inflasi di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara berkembang lainnya. Selain itu, dibahas pula mengenai berbagai faktor penyebab inflasi, mekanisme penetapan sasaran inflasi, serta upaya pengendalian inflasi di Indonesia.

4 Buku Seri Kebanksentralan mengenai Inflasi disusun oleh Suseno dan Siti Astiyah. Buku ini dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Tahun 2009. Buku ini selanjutnya diperbaharui dan diterbitkan oleh BI Institute sebagai bahan pengajaran Kebanksentralan.

2. KONSEP DAN TEORI INFLASI

2.1. Pengertian Inflasi

Fluktuasi harga barang dan jasa adalah hal yang umum kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tarif hotel dan tarif angkutan udara meningkat pada saat akhir minggu atau musim liburan. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya permintaan (*demand*) akan jasa transportasi dan penginapan. Pada saat lainnya, kita mengalami harga beras naik karena kegagalan panen atau sebaliknya turun karena panen yang melimpah. Fluktuasi harga, khususnya kenaikan harga pada suatu komoditas, yang terjadi karena perubahan *demand* dan *supply* sesaat tersebut tidak selalu menimbulkan dampak inflasi.

Dalam konsep makroekonomi, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Sebagaimana ditulis Suseno dan Astiyah (2009), dalam konteks tersebut terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut inflasi. Kenaikan harga pada komoditas tertentu yang terjadi karena faktor musiman, misalnya menjelang hari-hari besar atau karena gangguan *supply* sesaat dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan, tidak disebut inflasi.

Inflasi adalah indikator makroekonomi yang sangat penting karena memengaruhi nilai uang sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, Presiden Gerald Ford dari USA pernah menyatakan: “*Inflation is the number one public enemy*”, atau “Inflasi adalah musuh masyarakat yang utama.”

Konsep nilai dari uang (*time value of money*) menunjukkan seberapa besar nilai uang pada saat ini memiliki nilai yang sama di masa yang akan datang, dengan asumsi uang tersebut tidak diinvestasikan dalam surat-surat berharga atau disimpan dalam tabungan dan sejenisnya yang menghasilkan bunga. Semakin besar inflasi, maka semakin besar pula penurunan nilai uang. Dengan kata lain, jumlah barang dan jasa yang bisa dibeli dengan sejumlah rupiah pada saat ini akan semakin sedikit jika terjadi inflasi di tahun depan.

2.2. Pengukuran Inflasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum. Oleh karenanya, pengukuran inflasi umumnya diukur dalam ruang lingkup yang luas yaitu total kenaikan harga-harga atau peningkatan biaya hidup di suatu negara. Namun demikian, inflasi juga dapat diukur dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu untuk suatu kelompok komoditas, misalnya komoditas makanan dan jasa. Karenanya, kita sering mendengar istilah seperti inflasi kelompok bahan makanan dan inflasi kelompok perumahan. Semakin berkembang suatu perekonomian dan semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, maka penghitungan inflasi juga menjadi semakin kompleks.

Untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu, pada umumnya digunakan suatu angka indeks. Angka indeks disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan digunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Kelompok barang dan jasa yang dipilih tersebut diberi bobot sesuai tingkat signifikansi serta intensitas penggunaannya oleh masyarakat. Semakin besar tingkat penggunaan suatu barang dan jasa, semakin besar pula bobotnya dalam penghitungan indeks. Dengan demikian, perubahan harga barang dan jasa yang memiliki bobot besar akan memiliki dampak yang lebih besar pula terhadap inflasi. Perubahan angka indeks dari satu waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka persentase, adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut.

Angka indeks yang umum dipakai untuk menghitung besarnya inflasi adalah:

1) *Producer Price Index* (PPI)/Indeks Harga Produsen (IHP)

Producer Price Index atau Indeks Harga Produsen (IHP) mengukur perubahan harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. IHP mengukur tingkat harga yang terjadi pada tingkat produsen.

2) *Wholesale Price Index*/Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks Harga Perdagangan Besar mengukur perubahan harga untuk transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama. Di beberapa negara termasuk Indonesia, IHPB merupakan indikator yang

menggambarkan pergerakan harga dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu daerah.

3) *Consumer Price Index* (CPI)/Indeks Harga Konsumen (IHK)

Consumer Price Index adalah indeks yang paling banyak digunakan dalam penghitungan inflasi. Indeks ini disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang digunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut berbeda antarnegara dan antarwaktu, bergantung pada pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia pada awalnya hanya digunakan sembilan bahan pokok (meliputi pangan, sandang, dan perumahan) yang dikonsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah barang dan jasa tersebut berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup, antara lain, jasa kesehatan dan pendidikan.

Selain 3 indikator umum inflasi yang telah disebutkan di atas, terdapat juga dua indikator inflasi lainnya yang dapat dijadikan alat ukur perubahan tingkat harga, yaitu:

1) PDB Deflator (Produk Domestik Bruto Deflator)

PDB deflator mengukur perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. Cakupan perubahan harga yang diukur dalam PDB deflator lebih luas dibandingkan dengan IHK dan IHPB. Angka deflator tersebut dihitung dengan membandingkan PDB nominal pada suatu tahun tertentu dengan PDB pada tahun tertentu yang ditetapkan. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

2) Indeks Harga Aset (HA)

Perilaku pergerakan harga aset, baik aset berupa properti dan saham, dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Dalam hal ini, indeks harga aset (IHA) mencerminkan potensi tekanan permintaan ke depan melalui jalur *wealth effect*.⁵

Angka indeks tersebut dihitung secara periodik dan umumnya dilakukan secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Selanjutnya, berdasarkan angka

5 Jalur *wealth effect* melihat sejauh mana belanja konsumen berubah mengikuti nilai kekayaan yang dimiliki

indeks tersebut dapat dihitung laju inflasi dengan menghitung perubahan angka indeks dalam periode tertentu. Untuk angka inflasi bulanan (mtm), laju inflasi dapat dihitung dari perubahan angka indeks bulanan. Demikian pula untuk menghitung angka inflasi triwulanan, semesteran, maupun tahunan dari suatu perekonomian. Penghitungan inflasi secara bulanan sering disebut sebagai *month to month* (mtm), kuartalan sebagai *quarter to quarter* (qtq), dan tahunan sebagai *year on year* (yoy).

Ilustrasi berikut ini menggambarkan besarnya inflasi yang dihitung dari perubahan indeks.

$$\text{inflasi}_t = \left(\frac{IHK_t}{IHK_{t-1}} - 1 \right) * 100\%$$

Contoh :

1. Penghitungan inflasi tahunan (yoy)

Apabila indeks harga konsumen dengan tahun dasar 2007=100 pada September 2012 sebesar 134,45 dan angka indeks tersebut dengan tahun dasar yang sama pada September 2013 menjadi 145,74, maka inflasi tahunan pada bulan September 2013 adalah 8,40%.² Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut sebagai laju inflasi (*inflation rate*).

2. Penghitungan inflasi triwulanan (qtq)

Apabila angka indeks harga konsumen pada kuartal I (Maret) 2013 adalah sebesar 138,78 dan pada kuartal II (Juni) 2013 adalah sebesar 140,03, maka inflasi kuartalan (qtq) pada kuartal II 2013 adalah sebesar 0,90%

3. Penghitungan inflasi bulanan (mtm)

Apabila angka indeks harga konsumen pada Mei 2014 adalah 111,35 kemudian pada bulan Juni 2014 indeks harga konsumen berubah menjadi 112,01, maka inflasi bulanan (mtm) pada bulan Juni 2014 adalah sebesar 0,43%.

2.3. Teori Inflasi

Teori yang menerangkan inflasi cukup beragam sejalan dengan perbedaan pandangan dari para ekonom. Secara garis besar, teori mengenai inflasi dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu mereka yang menganut paham monetaris dan paham non monetaris.

1) Teori *Monetarist (Classical Theory on Inflation)*

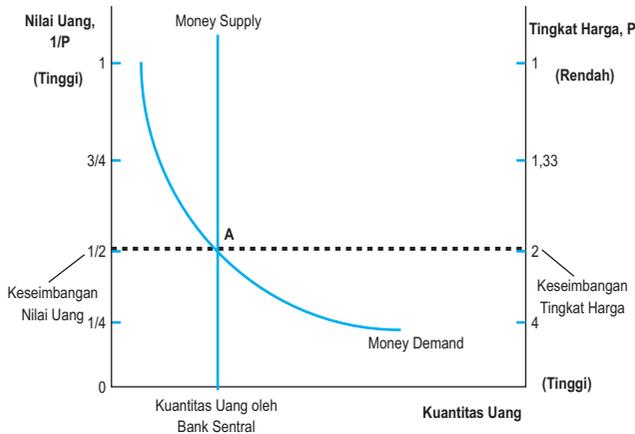
Teori klasik menganut paham monetaris. Teori ini menyatakan bahwa penawaran (*supply*) uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian memiliki hubungan langsung dengan perubahan tingkat harga. Peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong tingkat harga bergerak ke atas, demikian pula sebaliknya. Dengan alasan inilah Teori Klasik disebut juga dengan Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory Of Money*).⁶

Secara lebih spesifik, teori klasik menjelaskan bahwa tingkat harga secara umum ditentukan dari interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dari uang. Apabila tingkat harga berada di atas tingkat keseimbangan, maka jumlah uang yang diminta masyarakat lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, sehingga pada akhirnya tingkat harga akan turun menuju tingkat keseimbangan, begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada tingkat harga keseimbangan, maka jumlah kuantitas uang yang ingin dipegang oleh masyarakat jumlahnya persis sama dengan tingkat kuantitas uang yang diedarkan oleh bank sentral.

Hal tersebut disajikan pada Gambar 2-1, di mana sumbu horizontal menggambarkan kuantitas uang, sumbu vertikal kiri menggambarkan nilai uang ($1/P$), dan sumbu vertikal kanan menggambarkan tingkat harga (P). Perlu diperhatikan bahwa sumbu vertikal tingkat harga pada sebelah kanan merupakan kebalikan dari sumbu vertikal nilai uang pada sebelah kiri. Keadaan terbalik ini merupakan ilustrasi bahwa ketika nilai uang tinggi (seperti diperlihatkan pada sumbu vertikal kiri atas) maka dapat diartikan tingkat harga saat itu rendah (seperti diperlihatkan pada sumbu vertikal kanan atas).

6 Mankiw (2012)

Gambar 2-1.
Interaksi Kurva Permintaan dan Penawaran Uang



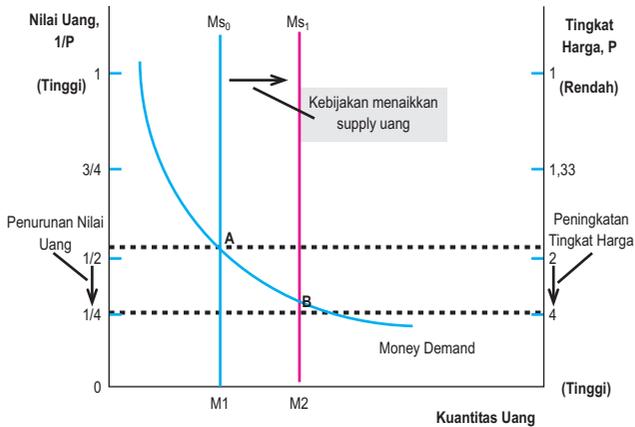
Sumber: Mankiw (2012)

Kedua kurva yang digambarkan dalam grafik di atas adalah kurva penawaran uang (*money supply*) dan permintaan uang (*money demand*). Kurva penawaran uang digambarkan vertikal karena bank sentral umumnya telah menentukan tingkat kuantitas uang yang tetap. Sedangkan kurva permintaan uang digambarkan menurun dari kiri atas ke kanan bawah menuju sisi kanan sumbu horizontal kurva (*downward sloping*). Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai uang rendah (tingkat harga tinggi), maka setiap orang harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperoleh barang dan jasa dengan jumlah yang sama dengan pembelian sebelumnya. Pada tingkat keseimbangan, seperti diperlihatkan pada titik A, kuantitas uang yang diminta sama dengan kuantitas uang yang beredar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang inilah yang menentukan nilai uang dan tingkat harga.

Kebijakan bank sentral untuk meningkatkan kuantitas uang dalam sirkulasi (mencetak lebih banyak uang) akan meningkatkan jumlah uang beredar. Bertambahnya jumlah uang beredar akan menggeser kurva penawaran dari Ms_0 ke Ms_1 sehingga titik keseimbangan akan bergeser dari A ke B. Akibatnya, dalam grafik tersebut, nilai uang menurun dari $1/2$ ke $1/4$ dan tingkat harga meningkat (dari 2 ke 4). Hal

inilah kunci implikasi dari teori klasikal (*monetarist theory*) yang menyatakan bahwa pertumbuhan uang beredar menyebabkan inflasi seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2-2.
Dampak Kebijakan Moneter Bank Sentral



Sumber: Mankiw (2012)

Dengan demikian, teori klasik mengenai inflasi memungkinkan kita untuk membahas inflasi tanpa mengaitkan dengan variabel makro lainnya seperti suku bunga dan tingkat pengangguran,. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil dibandingkan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi deflasi.

Teori kuantitas uang dinyatakan dengan persamaan Fischer yaitu:

$$M V = P Y$$

$$\frac{\Delta M_s}{M_s} + \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta Y}{Y}$$

Persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta M_s}{M_s} + \frac{\Delta V}{V} - \frac{\Delta Y}{Y}$$

Di mana $\Delta P / P$ = tingkat inflasi, $\Delta M_s / M_s$ = pertumbuhan jumlah uang beredar, $\Delta V / V$ = persentase perubahan dalam kecepatan perputaran uang dan $\Delta Y / Y$ = laju pertumbuhan *output*.

Persamaan di atas adalah elemen penting dalam menjelaskan keseimbangan tingkat harga dan inflasi. Berdasarkan teori ini, diketahui bahwa perputaran uang (*velocity of money*) relatif stabil sepanjang waktu sehingga dapat dikatakan kecepatan perputaran uang (V) adalah konstan ($\Delta V / V = 0$). Dikarenakan perputaran uang bersifat stabil, maka ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar (M_s) akan menyebabkan perubahan proporsional dalam nilai nominal barang (PY).

Dalam perekonomian, *output* barang dan jasa (Y) sangat ditentukan oleh faktor *supply* atau penawaran (seperti: tenaga kerja, modal fisik, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan ketersediaan teknologi produksi). Jika diasumsikan bahwa perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) sehingga laju pertumbuhan *output* akan bernilai konstan ($\Delta Y / Y = 0$), maka dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa sumber inflasi lebih disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar.

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta M_s}{M_s} \text{ atau } \text{Inflasi} = f(\text{jumlah uang beredar})$$

Berdasarkan teori ini, dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan *output* riil, tetapi akan mendorong kenaikan tingkat harga secara proporsional. Oleh karena, menurut teori ini, inflasi adalah semata-mata fenomena moneter, maka pengendalian inflasi sepenuhnya dilakukan dengan kebijakan moneter.

Ekonom yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran moneteris. Salah satu tokoh aliran moneteris adalah ekonom Milton Friedman dengan pernyataannya yang sangat terkenal, "*Inflation is always and everywhere a monetary*

phenomenon.“ Milton Friedman mendapat hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1976. Salah satu penelitian yang mampu mendukung teori kuantitas uang secara meyakinkan dilakukan oleh Sargent (1982). Penelitian ini difokuskan pada beberapa episode periode hiper inflasi yang terjadi di beberapa negara. Di dalam setiap episode ketika inflasi melebihi 100%, selalu diikuti dengan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang sangat tinggi. Hiper inflasi ini dapat dikendalikan ketika bank sentral melakukan tindakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan teori kuantitas uang adalah bagaimana menentukan nilai uang. Nilai uang ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan dari uang. Dalam perkembangan ekonomi modern, penawaran uang tidak sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi ditentukan pula oleh para partisipan di pasar uang dan kredit perbankan. Dalam perekonomian terbuka, penawaran uang tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku bank umum dan masyarakat tetapi juga perkembangan neraca pembayaran internasional.

Teori permintaan uang berkembang sejalan dengan perkembangan dari fungsi uang yang semula hanya sebagai media pertukaran tetapi juga sebagai penyimpan nilai (investasi). Permintaan uang di masyarakat secara umum ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi, di antaranya, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. Sesuai teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan masyarakat akan mendorong peningkatan harga dan memicu inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar lebih kecil dibandingkan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi deflasi.

Meskipun teori ini diterima oleh banyak ekonom dan digunakan untuk mengendalikan inflasi di masyarakat, namun ekonom yang menganut paham Keynesian memberikan kritikan yang cukup signifikan. Menurut mereka, teori ini tidak berlaku dalam jangka pendek ketika harga-harga sangat *rigid*. Lebih jauh mereka membuktikan bahwa tingkat perputaran uang tidak konstan.

2. Teori *Non Monetarist*

Pandangan yang berbeda dari konsep monetaris dapat digolongkan di antaranya adalah *Structuralist Theory* dan *Post Keynesian Theory*. Berbeda dengan teori klasik mengenai inflasi, teori strukturalis meyakini bahwa inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Menurut Boediono (1998), teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang. Penyebab inflasi berasal dari struktur perekonomian yang tidak mampu mengantisipasi dengan cepat perkembangan perekonomian. Teori ini menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural.

Teori struktural mencoba menganalisis bagaimana fenomena inflasi terjadi, mencari akar permasalahannya serta menganalisis hubungan di antaranya. Kebanyakan analisis teori strukturalis mencerminkan kasus inflasi di negara berkembang. Adanya goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya); atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*⁷, kekakuan produksi, utang luar negeri, dan nilai tukar valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Karena sebab-sebab struktural ini, pertambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, penawaran (*supply*) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat. Penganut teori strukturalis dalam menyelesaikan permasalahan inflasi seringkali menggunakan pendekatan moneter dan fiskal.

Menurut Teori Keynes, kuantitas uang bukanlah satu-satunya faktor penentu tingkat harga karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Keynesians menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika permintaan total (*agregat demand*) dari barang dan jasa melebihi total penawaran (*agregat supply*) saat keadaan *full employment* atau melebihi *output* potensialnya. Ada banyak faktor lain yang menurut Keynesian dapat memengaruhi tingkat harga, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga,

⁷ *Term of trade* menggambarkan nilai ekspor suatu negara relatif terhadap nilai impor. TOT dihitung dari nilai ekspor dibagi dengan nilai impor. Semakin besar perbandingan menunjukkan perekonomian yang lebih sehat karena negara mendapatkan lebih banyak pendapatan ekspor dibandingkan pengeluaran untuk impor.

pengeluaran untuk investasi, pengeluaran pemerintah dan pajak. Proses inflasi, menurut Keynes, adalah proses perebutan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan menyebabkan celah inflasi (*inflationary gap*). Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah *output* yang bisa dihasilkan. Inflasi akan berhenti apabila permintaan efektif total pada harga yang berlaku tidak melebihi jumlah *output* yang tersedia. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak serta merta dapat ditingkatkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya, sama seperti pandangan kaum monetarist, Keynesian model lebih banyak digunakan untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Model ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat *full employment* yang berarti bahwa tingkat pasokan produk (penawaran agregat) tidak dapat ditingkatkan lagi.

Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh peningkatan pengeluaran konsumsi, peningkatan investasi swasta (karena suku bunga kredit murah) serta peningkatan pengeluaran pemerintah (yang dibiayai dengan pencetakan uang baru)

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka secara umum perbedaan pendekatan Keynes dibandingkan pendekatan kaum monetarist dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (i) Dalam pendekatan monetaris, *output* aktual (penawaran agregat) selalu sama dengan *output* potensial ($Y_a = Y_p$); sedangkan dalam pendekatan Keynesian *output* potensial hanya berfungsi sebagai perkiraan *output* maksimum dalam jangka pendek sehingga tidak selalu sama dengan *output* aktual.
- (ii) Dalam pendekatan monetaris, kelebihan peningkatan kuantitas uang adalah satu-satunya penyebab terjadinya kenaikan harga atau inflasi; sedangkan dalam pendekatan Keynesian, kelebihan peningkatan dalam *total expenditure*, seperti pengeluaran investasi dan pengeluaran

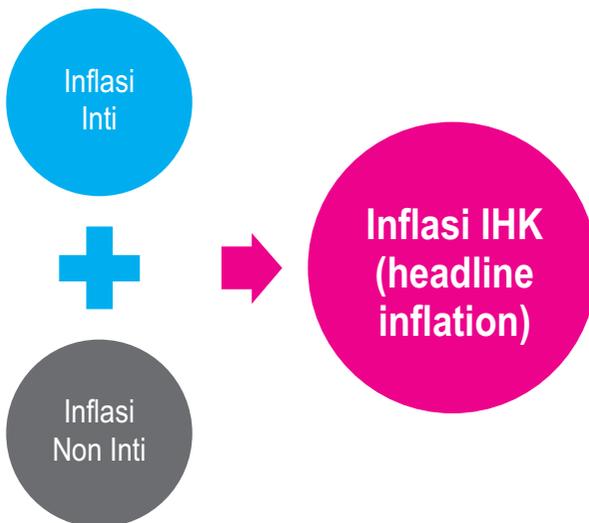
pemerintah, adalah sumber penyebab kelebihan permintaan total sehingga pada akhirnya menyebabkan inflasi.

2.4. Komponen Inflasi

Umumnya, inflasi dibagi berdasarkan karakteristik atau sifat perubahan harga dari kelompok barang dan jasa. Beberapa karakteristik atau sifat tersebut diantaranya apakah barang dan jasa tersebut cenderung sensitif terhadap kondisi tertentu, apakah perubahan inflasinya cenderung lebih disebabkan peraturan regulator, dan sebagainya. Jika kita mendengar kalimat “inflasi tahunan mencapai xx%,” biasanya inflasi dimaksud mengacu pada laju inflasi umum atau *headline inflation* (inflasi IHK), atau secara sederhana bisa dikatakan sebagai inflasi keseluruhan yang merupakan tingkat kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu.

Pada dasarnya, inflasi dapat dirinci menjadi dua komponen yaitu inflasi inti (*core inflation*) dan inflasi non inti seperti disajikan pada Gambar 2-3.

Gambar 2.3.
Disagregasi Inflasi



1. Inflasi Inti

Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti: interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

Berdasarkan pengertiannya, ada 2 konsep dalam pengertian inflasi inti. *Pertama*, inflasi inti sebagai komponen inflasi yang cenderung “menetap” atau persisten (*persistent component*) di dalam setiap pergerakan laju inflasi. *Kedua*, inflasi inti sebagai kecenderungan perubahan harga-harga secara umum (*generalized component*).

Quah dan Vahey (1995) mendefinisikan inflasi inti sebagai komponen inflasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap *output* riil dalam jangka menengah-panjang. Secara implisit mereka ingin mengatakan bahwa inflasi inti merupakan fenomena moneter. Oleh karena itu, komponen inflasi yang persisten ini akan tercermin pada ekspektasi masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, maka *supply shock* yang memberikan pengaruh permanen terhadap tingkat harga (misalnya, penenaan tarif bea masuk atas produk impor oleh pemerintah), namun tidak memberikan pengaruh terhadap laju inflasi dalam jangka menengah-panjang, tidak termasuk di dalam pengertian inflasi inti. Oleh karena itu, inflasi inti terkait dengan inflasi yang dapat diantisipasi; sedangkan inflasi sesaat terkait dengan unsur inflasi yang tidak dapat diantisipasi kejadiannya.

Inflasi inti atau *core inflation* pada beberapa literatur disebut juga dengan *underlying inflation*. Inflasi inti inilah yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh bank sentral, karena lebih mencerminkan karakteristik perkembangan harga yang bersifat persisten. Hal ini menyebabkan penggunaan inflasi inti sebagai sasaran operasional dapat memberikan sinyal yang tepat dalam memformulasikan kebijakan moneter. Sebagai contoh, dalam hal terjadi gangguan permintaan (*demand shock*) yang mengakibatkan inflasi tinggi, respon bank sentral akan mengetatkan uang beredar sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Di samping itu, kebijakan tersebut dapat juga untuk menyesuaikan kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sesuai dengan kapasitas perekonomian.

Sebaliknya, jika inflasi meningkat karena terjadinya gangguan penurunan di sisi penawaran (*supply side*), misalnya kenaikan harga makanan karena musim kering, maka kebijakan uang ketat justru dapat memperburuk tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi. Respon yang dapat dilakukan oleh bank sentral adalah kebijakan melonggarkan likuiditas perekonomian untuk menstimulir peningkatan penawaran.

2. Inflasi Non Inti (*Non Core Inflation*)

Inflasi non inti adalah komponen inflasi dengan volatilitas cenderung tinggi karena dipengaruhi faktor non fundamental yang cenderung bersifat sementara. Inflasi non inti dapat didefinisikan sebagai inflasi yang disebabkan gangguan dari penawaran dan di luar kendali otoritas moneter serta bersifat sesaat. Inflasi non inti sering disebut *noises inflation*.

Okun (1970) dan Fleming (1976), dalam Tjahjono et.all., (2000), menyatakan bahwa inflasi non inti merupakan komponen perubahan harga relatif, terutama akibat gangguan-gangguan dari sisi *supply* (*supply disturbances*). Gangguan/perubahan harga relatif dalam hal ini dipandang sebagai inflasi sesaat karena secara teoritis gangguan/perubahan harga relatif tidak dapat mendorong terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum yang bersifat persisten, kecuali bila diakomodasi oleh kebijakan moneter. Hal serupa dinyatakan oleh Roger (1998) bahwa perubahan harga relatif pada umumnya akan terkait dengan laju inflasi sesaat (*noises*), sementara komponen kenaikan harga-harga secara umum akan lebih bersifat menetap atau persisten.

Komponen inflasi non inti sendiri dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu:

(i) Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan, seperti: panen, gangguan alam, atau perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional. Sebagai contoh: inflasi beras, cabe, dan beberapa jenis sayuran sering berfluktuasi tajam karena dipengaruhi kondisi kecukupan pasokan komoditas tersebut, seperti faktor musim panen, gangguan distribusi, bencana alam maupun hama.

(ii) Inflasi Komponen Harga yang Diatur Pemerintah (*Administered Prices*) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama dipengaruhi oleh sisi *supply* berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak dapat hanya direspon oleh kebijakan moneter semata yang merupakan tugas bank sentral. Untuk menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil perlu dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi gangguan dari sisi *supply*, termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah.

Secara teoritis, laju inflasi umum atau *headline inflation* (inflasi IHK) yang merupakan tingkat kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu (bulan, kuartal, dan tahun) dapat didekomposisikan menjadi sebagai berikut:

$$P_t = \pi_t + \varepsilon_t + c$$

Di mana:

p = *headline inflation* (seperti yang diukur oleh IHK)

π = inflasi inti (*core inflation* atau komponen yang persisten)

ε = inflasi sesaat (*noise* atau komponen yang *transient*)

c = inflasi yang berasal dari perubahan kebijakan pemerintah.

Komponen inflasi inti (π) merupakan pergerakan harga-harga secara umum yang cenderung persisten dan terkait dengan ekspektasi masyarakat serta kondisi *demand* dan *supply*. Sementara itu, komponen ε merupakan perkembangan harga-harga yang bersifat sementara, baik yang disebabkan oleh gejolak unsur musim, maupun gangguan di sisi pasokan (produksi dan distribusi). Secara teoritis, pengaruh unsur musim dan gangguan di sisi pasokan dalam jangka panjang akan cenderung saling meniadakan sehingga diharapkan nilai $\varepsilon = \text{nol}$. Sementara itu, komponen c yang berasal dari perubahan kebijakan pemerintah (baik di bidang pengendalian harga, perdagangan, maupun perpajakan) akan mengakibatkan terjadinya kenaikan/

penurunan tingkat harga. Dalam praktik pengukuran inflasi inti, komponen c dan ϵ sering digabungkan dan dianggap menjadi komponen inflasi sesaat (inflasi non inti).

Secara umum, terdapat beberapa metode pendekatan pengukuran inflasi inti, antara lain:

1) Metode *Trimming*

Metode ini merupakan metode pengukuran inflasi inti dengan melakukan pemangkasan secara acak (*random*). Taksiran inflasi inti dihasilkan dengan memangkas proporsi tertentu perubahan harga komoditas pada kedua ujung distribusi berdasarkan *percentile* distribusi. Meskipun dapat menghasilkan taksiran inflasi inti yang cukup terpercaya, namun metode ini relatif sulit dijelaskan kepada masyarakat. Hal ini karena jenis komoditi yang dipangkas secara statistik tidak selalu sama pada setiap periode, sehingga jenis komoditi yang dikeluarkan pada setiap periodenya menjadi kurang relevan (tidak dapat dibandingkan antara satu periode dan periode lainnya).

2) Metode *Exclusion*

Metode ini mengeluarkan sebagian komponen inflasi yang memberikan *shocks* temporer dari keranjang IHK, seperti komoditas yang perkembangan harganya bergejolak (*volatile food*) dan komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*). Metode ini banyak digunakan karena cara penghitungannya sederhana, mudah dipahami, dapat tersedia secara tepat waktu, dan cakupan komoditasnya tetap sehingga dapat dibandingkan antara satu periode dan periode lainnya. Metode ini paling banyak digunakan dalam penghitungan inflasi.

3) Metode kedekatan hubungan dengan besaran moneter (Metode Struktural)

Metode ini melibatkan beberapa variabel yang mempunyai hubungan erat dengan inflasi dalam suatu sistem persamaan Structural Vector Autoregression (SVAR). Asumsi dasarnya adalah pergerakan inflasi umum (IHK) merupakan hasil dari *shocks* sesaat terhadap harga yang berasal dari perkembangan pada sisi penawaran dan *shocks* persisten terhadap harga yang terjadi dari perkembangan sisi permintaan, kelembaman harga, dan pembentukan ekspektasi inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter.

Pemilihan konsep penghitungan inflasi oleh Bank Sentral, apakah menggunakan inflasi umum (*headline inflation*) atau inflasi inti (*core inflation*), dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *predictability*, *controlability* dan *acceptability*. *Predictability* dimaksudkan bahwa sasaran inflasi yang dipilih mudah untuk diprediksi dengan pendekatan model ekonomi yang tersedia, sehingga memudahkan dalam melihat kecenderungan inflasi ke depan. *Controlability* dalam arti bahwa inflasi dimaksud dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh bank sentral sehingga kebijakan moneter yang ditempuh dapat secara efektif memengaruhi perkembangan inflasi ke depan. *Acceptability* dimaksudkan bahwa inflasi yang dipilih mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga tujuan bank sentral dalam mencapai sasaran inflasi memberikan manfaat dan menjadi perhatian masyarakat luas.

2.5. Dampak Inflasi

Menjaga stabilitas harga atau tingkat inflasi merupakan tugas utama bank sentral, termasuk Bank Indonesia. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan indikasi perekonomian nasional yang dikelola dengan baik. Bagi masyarakat umum, inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup karena memengaruhi daya beli; dan bagi dunia usaha, laju inflasi merupakan faktor yang penting dalam membuat berbagai keputusan. Oleh karenanya, faktor inflasi senantiasa menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seberapa besar batas nilai inflasi (*threshold*) yang dapat ditolerir dan tidak memberikan dampak buruk pada perekonomian bergantung pada karakteristik dari perekonomian. Beberapa penelitian yang mengulas mengenai *threshold* tersebut didasarkan atas hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak linier (Fischer, 1993). Khan dan Senhadji (2000) menyatakan bahwa *threshold* inflasi untuk negara maju adalah 1-3% dan untuk negara berkembang adalah 11-12%. Nilai *threshold* inflasi untuk negara-negara Asia, menurut Vinayagathan (2013), adalah 5,45%.

Secara umum dampak dari inflasi yang tinggi dan tidak stabil adalah:

1) Penurunan daya beli (*purchasing power*)

Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli karena nilai uang yang semakin rendah. Dengan nilai uang yang sama, jumlah barang dan jasa

yang dapat dibeli akan berkurang jumlahnya. Dampak penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi tidak sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan rendah adalah yang paling dirugikan akibat inflasi. Apabila hal ini dibiarkan dapat menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya aksi buruh untuk kenaikan upah dan meningkatnya kemiskinan.

2) **Kondisi ketidakpastian**

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Masyarakat akan kesulitan untuk menentukan alokasi dananya. Masyarakat cenderung menyimpan dananya dalam bentuk aset fisik dibandingkan tabungan di bank. Oleh karenanya, inflasi mengurangi insentif untuk menabung. Bagi dunia usaha, inflasi yang tinggi akan mengurangi insentif untuk investasi, karena ketidakpastian akan profit dan biaya di masa depan. Kondisi ketidakpastian ini dalam jangka panjang akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

3) **Berkurangnya daya saing produk nasional**

Inflasi yang tinggi membuat biaya produksi juga tinggi sehingga barang produksi nasional menjadi tidak kompetitif, baik untuk dikonsumsi dalam negeri maupun diekspor. Hal ini akan mendorong peningkatan impor yang akan berpengaruh terhadap performa neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Bagi para ekonom, dampak inflasi dilihat sebagai biaya (*cost*) yang timbul terhadap perekonomian makro. Biaya inflasi dari sudut pandang ekonom dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu: i) *cost of expected inflation* atau biaya karena inflasi yang terduga; dan ii) *cost of unexpected inflation* atau biaya karena inflasi yang tidak terduga.

Biaya-biaya di bawah ini tergolong jenis biaya karena inflasi yang terduga.

a. *Shoe-leather cost*

Pada saat inflasi tinggi, masyarakat cenderung mengurangi jumlah uang kas yang dipegang dengan harapan agar dananya mendapatkan bunga yang optimal dari penempatan di bank. Hal ini dikarenakan nilai uang yang terus menurun. *Shoe leather cost* merupakan istilah untuk menggambarkan *opportunity cost* yang hilang, karena mereka harus melakukan perjalanan

ke bank lebih sering untuk mengambil uang dibandingkan pada saat periode inflasi yang rendah.

b. *Menu costs*

Menu cost menggambarkan biaya ekstra yang timbul karena pemilik usaha lebih sering mengganti daftar harga (*price tag*) barang dan jasa yang dijual pada saat periode inflasi tinggi. *Menu cost* dapat juga dipahami sebagai biaya ekstra yang timbul karena perubahan harga tidak stabil.

c. Distorsi pajak

Laju inflasi akan mendistorsi pajak pendapatan atau keuntungan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik pajak perorangan maupun badan usaha yang pada umumnya bersifat progresif.⁸ Sebagaimana diketahui, pajak umumnya dikenakan pada pendapatan atau laba nominal yang diperoleh. Dengan adanya inflasi maka kenaikan pendapatan atau keuntungan tersebut tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya, karena sebagian pendapatan atau laba tersebut sudah tergerus oleh inflasi.

d. Peningkatan volatilitas harga relatif

Dalam kondisi laju inflasi yang sangat berfluktuasi, maka harga-harga secara relatif juga berubah terhadap tingkat harga secara umum. Kondisi ini akan mendistorsi tingkat harga yang merupakan sinyal ekonomi yang penting dalam perekonomian. Perubahan dan variasi harga relatif yang timbul karena adanya ketidakpastian harga (inflasi) dapat mengakibatkan masyarakat (individu dan dunia usaha) memboroskan sumber daya ekonomi untuk mencari harga yang berbeda-beda.

Salah satu contoh inflasi yang tidak menentu dan tak terkendali adalah kondisi hiperinflasi, di mana laju inflasi meningkat lebih dari 100%. Dalam keadaan hiperinflasi, setiap orang akan berusaha untuk membelanjakan uangnya sampai habis atau menukarkannya dengan mata uang yang lebih stabil. Akibatnya, terjadi inefisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi.

Selain biaya dari inflasi yang terduga, para ekonom juga menggolongkan biaya yang terjadi karena inflasi yang tidak terduga, yakni:

⁸ Pajak progresif adalah pengenaan pajak secara berjenjang sejalan dengan peningkatan pendapatan atau laba yang diperoleh. Semakin besar pendapatan atau laba maka tarif pajak akan semakin besar.

1) Redistribusi Pendapatan

Salah satu biaya inflasi yang tak terduga adalah redistribusi pendapatan secara *arbitrary* dari kreditur (*lender*) kepada debitur (*borrower*). Dalam kondisi inflasi, debitur akan lebih diuntungkan dibandingkan kreditur. Pembayaran kembali pokok dan bunga atas uang yang dipinjam secara riil menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dalam kondisi ini maka kreditur menjadi pihak yang dirugikan.

- 2) Biaya lainnya yang tergolong biaya yang tak terduga adalah biaya karena nominal kontrak yang bersifat tetap. Pada umumnya, kontrak jangka panjang dibuat dengan memasukkan perkiraan inflasi ke dalamnya. Masyarakat yang menggunakan kontrak tetap (*fixed*) akan mengalami kerugian jika inflasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan semula. Sebagai contoh, pembayaran pensiun yang dibayarkan dengan sistem kontrak tetap akan merugikan penerimanya ketika inflasi bergerak naik karena nilai uang yang semakin rendah.

3. INFLASI DI INDONESIA

3.1. Pengukuran Inflasi di Indonesia

Angka indeks (indikator) yang umum dipakai untuk menghitung inflasi di Indonesia adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi IHK di Indonesia dihitung dengan menggunakan berbagai survei dan sensus, di antaranya, Sensus Ekonomi untuk penetapan kerangka sampel pasar/toko/outlet; Survei Biaya Hidup untuk menetapkan basket komoditas; dan Sensus Penduduk serta Survei Sosial Ekonomi Nasional untuk menetapkan jumlah rumah tangga.

Dalam penghitungan IHK di Indonesia, formula yang digunakan adalah formula Laspeyres yang dimodifikasi sebagai berikut:

Di mana :

Inflasi_n = Inflasi periode ke-n

IHK_n = Indeks harga konsumen periode ke-n

IHK_{n-1} = Indeks harga konsumen periode ke-n-1

RH_n = Harga relatif periode ke-n

NK_n = Nilai konsumsi periode ke-n-1

P_{ni} = Harga barang i pada periode ke-n

P_{(n-1)i} = Harga jenis barang i periode ke-(n-1)

P_{ni}Q_{0,i} = Nilai konsumsi jenis barang i pada periode ke-n

P_{(n-1)i}Q_{0,i} = Nilai konsumsi jenis barang i pada periode ke-(n-1)

K = Jumlah jenis barang paket komoditi

Dalam penghitungan harga komoditas, ukuran yang digunakan adalah rata-rata aritmatik, tetapi untuk beberapa komoditas, seperti: beras, minyak goreng, bensin, dan sebagainya, digunakan rata-rata geometri. Angka inflasi dicatat dalam bentuk indeks: bulanan (mtm), tahun ke tahun (yoy) dan tahun kalender (ytd). Inflasi bulanan (mtm) mencerminkan persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun merupakan persentase perubahan IHK pada bulan berjalan terhadap IHK periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian untuk inflasi tahun kalender adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Barang dan jasa yang dimasukkan dalam IHK untuk menghitung inflasi telah mengalami perkembangan dan perbaikan dari waktu ke waktu. Beberapa hal yang melatarbelakangi perkembangan penghitungan inflasi di Indonesia, di antaranya, adalah: i) perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perilaku pendapatan dan selera; ii) terjadinya krisis/*shock* sehingga perlu penyesuaian tahun dasar; iii) perkembangan jenis serta kualitas barang dan jasa; iv) adanya perubahan kemajuan pasar, outlet maupun supermarket.

Pada awal tahun 1950-an, IHK hanya memperhitungkan harga sejumlah bahan makanan. Daerah yang dipergunakan sebagai wilayah survei juga masih sangat terbatas, yaitu hanya beberapa kota besar di Indonesia yakni: Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, dan Pontianak. Dalam perkembangannya, angka indeks harga konsumen tersebut terus mengalami penyempurnaan. Jumlah barang dan jasa yang diperhitungkan dalam angka indeks terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi konsumen di Indonesia. Demikian juga dengan cakupan daerah yang diperhitungkan dalam wilayah survei.

Mulai Januari 2014, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2012=100 (Survei Biaya Hidup 2012) dan mencakup 82 kota yang terdiri dari 33 ibu kota propinsi dan 49 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007=100 (Survei Biaya Hidup 2007) dan hanya mencakup 66 kota.

Perkembangan jumlah barang dan jasa serta cakupan daerah survei untuk penghitungan angka indeks dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada Tabel 3-1.

Tabel 3-1.
Keranjang IHK

Periode	Tahun Dasar (IHK=100)	Area Survei	Jumlah barang yang disurvei
1963	1953	Jakarta	19 Komoditi
1964 - 1978	1957/1958	Jakarta	62 Komoditi; 4 Kelompok
1978 - 1989	Apr 1977-Mar 1 988	17 Kota	115 Komoditi; 4 Kelompok
Jan 1990 - Mar 1998	Apr 1988-Mar 1989	27 Kota	225 Komoditi; 4 Kelompok
Apr 1998 - Sep 1999	1996	44 Kota	353 Komoditi; 7 Kelompok
Okt 1999 - Des 2003	1996	43 Kota	353 Komoditi; 7 Kelompok
Jan 2004 - Jun 2008	2002	45 Kota	744 Komoditi; 7 Kelompok
Jul 2008 - Des 2013	2007	66 Kota	774 Komoditi; 7 Kelompok
Jan 2014 - sekarang	2012	82 Kota	859 Komoditi; 7 Kelompok

Kelompok barang dan jasa yang diperhitungkan dalam indeks harga konsumen sejak April 1998 dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: i) bahan makanan; ii) makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; iii) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; iv) sandang; v) kesehatan; vi) pendidikan, rekreasi, dan olah raga; dan vii) transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi.

Untuk memperhitungkan besarnya konsumsi masyarakat atas setiap jenis barang dan jasa yang termasuk dalam angka indeks tersebut, pemerintah melakukan survei biaya hidup dari waktu ke waktu. Sejak Februari 2014, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di 82 kota sampel, baik di pasar tradisional maupun modern.

Jumlah, tipe, spesifikasi, dan kualitas barang dan jasa yang dipilih untuk dimasukkan dalam penghitungan IHK adalah barang yang paling banyak dikonsumsi dan dibeli pada periode survei biaya hidup dilakukan. Survei ini juga menentukan signifikansi barang dan jasa secara relatif terhadap keranjang IHK keseluruhan. Masing-masing kelompok barang tersebut mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan signifikansinya. Tabel 3-2 mempresentasikan bobot untuk masing-masing kelompok barang dalam IHK.

Tabel 3-2.
Struktur Pengelompokan IHK

Bobot Kelompok/Sub Kelompok	Tahun Dasar 2012 (2012=100)
Umum	100,00
I. BAHAN MAKANAN	18,85
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	4,03
Daging dan Hasil-hasilnya	2,52
Ikan Segar	2,50
Ikan Diawetkan	0,59
Telur, Susu dan Hasil-hasilnya	2,06
Sayur-sayuran	1,64
Kacang-kacangan	0,81
Buah-buahan	1,64
Bumbu-bumbuan	0,81
Lemak dan Minyak	1,45
Bahan Makanan Lainnya	0,19

Tabel 3-2.
Struktur Pengelompokan IHK Lanjutan

Bobot Kelompok/Sub Kelompok	Tahun Dasar 2012 (2012=100)
II. MAKANAN JADI, MUNIMAN, ROKOK & TEMBAKAU	16,19
Makanan Jadi	10,01
Minuman yang tidak Beralkohol	2,85
Tembakau dan Minuman Beralkohol	3,33
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	25,37
Biaya Tempat Tinggal	13,84
Bahan Bakar, Penerangan dan Air	5,91
Perlengkapan Rumah Tangga	2,32
Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,30
IV. SANDANG	7,25
Sandang laki-laki	1,80
Sandang Wanita	1,86
Sandang Anak-anak	1,19
Barang Pribadi dan Sandang Lain	2,40
V. KESEHATAN	4,73
Jasa Kesehatan	2,75
Obat-obatan	0,78
Jasa Perawatan Jasmani	0,50
Perawatan Jasmani dan Kosmetika	1,70
VI. PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAH RAGA	8,46
Jasa Pendidikan	4,07
Kursus-kursus/Pelatihan	0,34
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	1,31
Rekreasi	2,63
Olah raga	0,21
VII. TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	19,15
Transportasi	12,25
Komunikasi dan Pengiriman	4,76
Sarana dan Penunjang Transpor	1,63
Jasa Keuangan	0,51

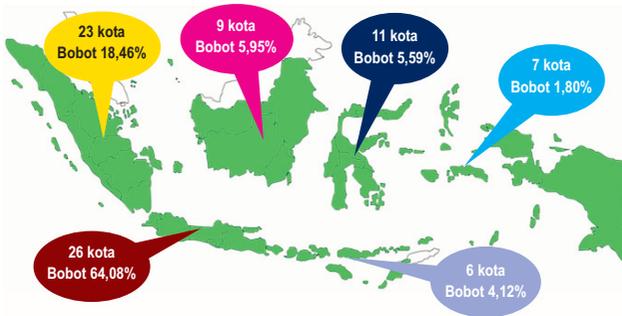
Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Selain pembobotan terhadap barang dan jasa, pembobotan juga dilakukan terhadap kota yang disurvei, yaitu 82 kota di Indonesia yang menjadi basis penghitungan inflasi nasional. Inflasi Indonesia sebagian besar merupakan kontribusi inflasi daerah dengan bobot yang mencapai 80,77 % (di luar Jakarta). Mengingat sumbangan inflasi daerah terhadap pembentukan inflasi nasional relatif besar, upaya pengendalian inflasi dalam rangka menciptakan stabilitas harga di tingkat nasional hanya dapat diwujudkan jika stabilitas harga terjadi pada tingkat daerah. BPS menentukan besarnya bobot penimbang kota berdasarkan proporsi

jumlah rumah tangga ekonomi tipikal⁹ yang ada di daerah tersebut terhadap nasional.

Gambar 3-1 menunjukkan pembobotan IHK per kawasan yang mengindikasikan bahwa bobot penimbang kota terbesar sebagian besar adalah di Jawa sebesar 64,08%, diikuti oleh kawasan Sumatera sebesar 18,46%, Kalimantan 5,95%, Sulawesi 5,59%, Bali Nusra 4,12% dan Papua 1,8%.

Gambar 3-1.
Bobot Inflasi di Indonesia Per Kawasan



3.2. Dinamika & Karakteristik Inflasi di Indonesia

Laju inflasi Indonesia mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan perekonomian sebagaimana terlihat pada Grafik 3-1. Indonesia mencatat beberapa periode dengan inflasi tinggi bahkan tergolong hiperinflasi,¹⁰ salah satunya di tahun 1960-an dengan rata-rata sebesar 294%. Inflasi yang tinggi pada periode tersebut disebabkan kebijakan defisit anggaran Pemerintah, sehingga meningkatkan jumlah uang beredar dan pada gilirannya mendorong laju inflasi. Pemerintah melakukan defisit anggaran untuk membiayai program angkatan bersenjata terkait politik nasional yaitu pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Selain itu, perhatian Pemerintah juga belum sepenuhnya terfokus pada perekonomian sehingga investasi belum berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, masalah keterbatasan pasokan bahan pangan dibandingkan permintaan serta spekulasi berlebihan membuat harga-harga tidak terkendali.

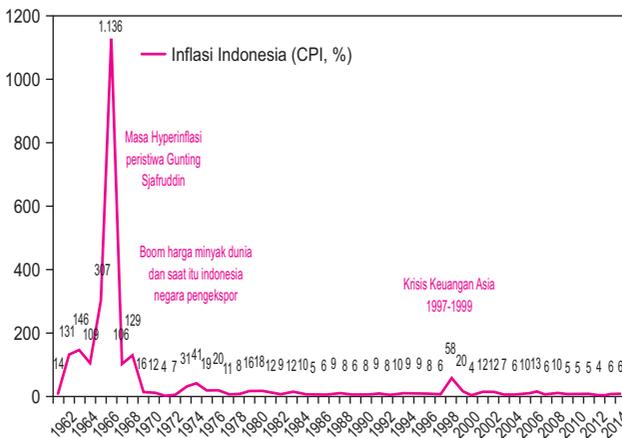
⁹ Rumah tangga tersebut menerima pendapatan juga sekaligus mengeluarkan untuk kegiatan konsumsinya.

¹⁰ Hiperinflasi terjadi ketika nilai inflasi mencapai lebih dari 100%.

Pada akhir 1960 dan akhir 1990, Indonesia mengalami periode inflasi yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 10-12% per tahun, kecuali pada saat terjadi *shock* eksternal. Di antara periode tersebut, tercatat 3 peristiwa *shock* eksternal dan dua di antaranya karena kenaikan harga minyak dunia yaitu tahun 1973-1974 dan tahun 1979-1980. Kenaikan harga minyak dunia tersebut membuat penerimaan pemerintah dari minyak meningkat tinggi sehingga meningkatkan jumlah uang beredar yang mendorong inflasi meningkat tajam. Pada kedua periode tersebut inflasi masing-masing tercatat sebesar 35% dan 20% per tahun.

Shock eksternal selanjutnya adalah krisis keuangan Asia pada 1997-1999. Pada saat puncak krisis di 1998, inflasi Indonesia tercatat sebesar 60%. Pada saat itu tidak terjadi hiperinflasi karena Pemerintah pada akhirnya melakukan kebijakan stabilitasi perekonomian yang didukung IMF.

Grafik 3-1.
Dinamika Inflasi IHK Indonesia



Sumber: World Bank

Dengan mengeluarkan semua periode ekstrim tersebut di atas, secara rata-rata inflasi Indonesia¹¹ tergolong tinggi walaupun masih *single digit*. Namun demikian, dari grafik 3-2, dapat kita lihat bahwa rata-rata inflasi mengalami penurunan dari periode sebelum krisis (1975-1997) sebesar 10,3% menjadi

¹¹ Rata-rata inflasi sejak 1960 hingga 2014 dengan mengeluarkan periode yang memiliki inflasi > 20% adalah sebesar 9,2%

sebesar 7,5% (2000-2014). Setelah Bank Indonesia melakukan kebijakan ITF pada 2005, tingkat inflasi rata-rata Indonesia semakin menurun menjadi 7,2%. Hal ini juga diikuti dengan penurunan standar deviasinya masing-masing dari 4,2% (1975-1997) menjadi 3% (2000-2014) dan menjadi 2,9% pada periode setelah ITF (2005-2014). Hal ini menggambarkan bahwa inflasi secara umum berkurang volatilitasnya.

Pada periode sesudah krisis, inflasi yang cukup tinggi terjadi di tahun 2000-2001, 2005-2006 dan 2008. Tingginya inflasi pada periode awal sesudah krisis diduga banyak dipengaruhi kondisi sosial politik yang belum stabil sehingga memengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Laju inflasi tahun 2005 merupakan laju inflasi tertinggi dalam periode sesudah krisis, yaitu sebesar 17,1%. Melambungnya harga minyak dunia dan kenaikan harga BBM domestik pada bulan Oktober 2005 dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal memberikan tekanan kuat terhadap inflasi 2005.¹² Selain dampak tekanan eksternal dan kenaikan harga BBM tersebut, gangguan pasokan dan distribusi serta depresiasi nilai tukar rupiah juga turut memberikan tekanan kuat pada inflasi.

Laju inflasi tahun 2008 juga tercatat *double digit* yaitu sebesar 11,1% dan merupakan laju inflasi tertinggi kedua setelah tahun 2005. Tingginya laju inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga minyak dan pangan dunia. Untuk merespon kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi pada Mei 2008. Kenaikan laju inflasi kelompok *administered price* ini berkontribusi cukup besar terhadap laju inflasi 2008. Kenaikan harga BBM tersebut diperparah dengan kelangkaan minyak tanah dan LPG di berbagai daerah. Selain dampak langsung, kenaikan harga BBM juga telah mengakibatkan dampak lanjutan berupa dampak tidak langsung (*second round effect*), misalnya kenaikan tarif angkutan. Kenaikan berbagai harga pangan dunia juga berkontribusi pada kenaikan kelompok barang *volatile food*, sehingga laju inflasi menjadi semakin tinggi.

Selama periode 2010-2015, perkembangan inflasi IHK (*headline inflation*) di Indonesia relatif terkendali, meskipun terdapat dua kali kebijakan kenaikan

¹² Laju inflasi dunia mengalami peningkatan pada tahun 2005 dan tercatat sebesar 3,80% meningkat dari 3,60% pada tahun 2004. Peningkatan laju inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak. Pada tahun 2005 tercatat bahwa harga minyak dunia adalah US\$56,5 per barel yang meningkat dari US\$39,1 per barel pada tahun 2004. Dalam rangka meredam tekanan laju inflasi ini, beberapa bank sentral melakukan kebijakan moneter yang cenderung ketat

harga BBM oleh Pemerintah. Inflasi IHK berada pada posisi tertinggi di Agustus 2013 sebesar 8,50% (yoy), sekitar dua bulan pasca kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah pada 22 Juni 2013.¹³ Hal itu terlihat dari lonjakan inflasi *administered prices* (harga yang diatur pemerintah) mulai bulan Juli-September 2013. Sebelum kebijakan tersebut, inflasi IHK lebih didorong oleh inflasi *volatile food* (bahan makanan bergejolak) pada periode Februari 2010 sampai dengan Maret 2011. Inflasi IHK kembali meningkat ketika Pemerintah kembali melakukan kebijakan kenaikan harga BBM pada 18 November 2014.¹⁴ Dampak dari kenaikan harga BBM tersebut mencapai puncaknya pada Desember 2014 dengan inflasi IHK mencapai 8,08% (yoy).

Namun, sejak Januari 2015, Pemerintah telah mencabut subsidi atas harga bensin premium dan memberikan subsidi harga tetap sebesar Rp1.000/liter untuk minyak solar. Kebijakan ini menyebabkan harga bensin premium dan minyak solar dapat berfluktuasi setiap bulannya, karena penetapan harga kedua BBM tersebut pada mulanya dilakukan setiap bulan oleh Pemerintah. Ketika harga minyak mentah dunia menurun dan nilai tukar rupiah relatif stabil, harga kedua jenis BBM tersebut ikut menurun; dan sebaliknya, ketika harga minyak mentah dunia naik dan nilai tukar rupiah relatif stabil, harga kedua jenis BBM tersebut dinaikkan. Akibatnya, ketika harga BBM diturunkan tekanan inflasi IHK berkurang, dan sebaliknya ketika harga BBM dinaikkan tekanan inflasi IHK meningkat. Hal itu tercermin dari inflasi *administered prices* yang fluktuatif pasca pemberlakuan kebijakan tersebut. Namun, belakangan Pemerintah mengubah mekanisme evaluasi harga kedua jenis BBM tersebut menjadi 6 bulan sekali untuk mengurangi fluktuasi harga yang cenderung menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian. Perubahan harga BBM dan *administered prices* lainnya, seperti tarif listrik, cenderung mewarnai perkembangan inflasi IHK, sementara inflasi inti relatif stabil sejak awal tahun 2015.

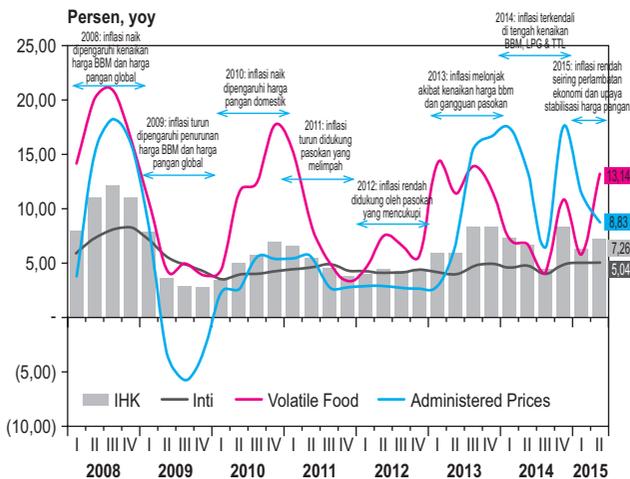
Secara umum, dari grafik di bawah ini terlihat bahwa tekanan inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi *shocks*, terutama gangguan pasokan dan distribusi pangan (*volatile foods*) serta kebijakan strategis dari pemerintah

13 Melalui Keputusan Menteri ESDM No.07/PM/12/MEM/2013 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran BBM Bersubsidi, pemerintah menaikkan harga bensin premium dari Rp4500/liter menjadi Rp6500/liter dan minyak solar dari Rp4500/liter menjadi Rp5500/liter.

14 Pemerintah menaikkan harga bensin premium dan minyak solar masing-masing sebesar Rp2000/liter dari harga pada Juni 2013.

(*administered prices*). Pola musiman juga berpengaruh signifikan terhadap pergerakan inflasi khususnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Kenaikan harga pada pola musiman lebaran ditengarai juga akibat dari meningkatnya ekspektasi inflasi. Namun demikian, peningkatan ekspektasi tersebut bersifat temporer dan akan terkoreksi menurun pasca hari raya. Pada grafik dapat terlihat bahwa *shocks temporer* akan mengembalikan IHK pada tren jangka panjangnya (inflasi inti).

Grafik 3-2.
Perkembangan Inflasi IHK 2008-2015

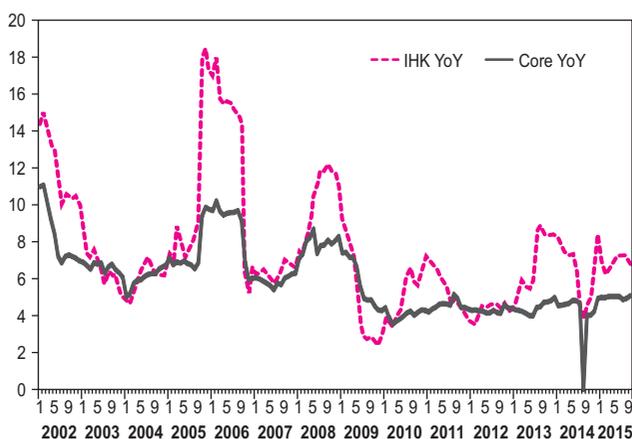


Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, inflasi dapat didisagregasi menjadi inflasi inti (*core inflation*), *volatile food*, dan *administered price*. Untuk penghitungan inflasi inti yang umum digunakan oleh BPS maupun Bank Indonesia adalah metode *exclusion*. Di Indonesia, jumlah komoditas yang masuk dalam penghitungan inflasi inti sebanyak 751 komoditas dengan bobot 6,36 % (SBH 2012). Apabila dilihat pada grafik 3-4, pergerakan laju inflasi inti (*core inflation*) mengalami penurunan dari waktu ke waktu terutama sesudah periode penerapan ITF (*inflation targeting framework*) oleh Bank Indonesia yaitu sejak 2005-2015. Sejak periode tersebut, rata-rata inflasi inti berada di kisaran 6,18%, dengan standar deviasi 1,9% dan apabila dibandingkan dengan inflasi IHK secara umum, tingkat inflasi inti cenderung selalu berada di bawah tingkat inflasi umum (IHK).

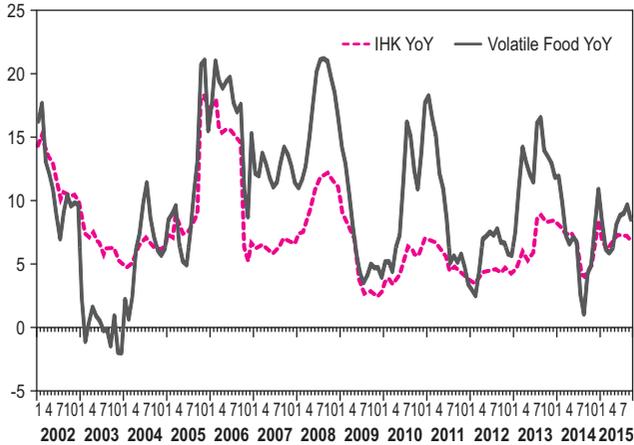
Berbeda dengan pergerakan inflasi inti, pergerakan inflasi *volatile food* di Indonesia cenderung lebih fluktuatif dan hampir selalu lebih tinggi dibanding inflasi IHK pada umumnya. Gejala *volatile food* dapat memengaruhi inflasi inti, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya memengaruhi pergerakan inflasi IHK secara signifikan. Secara langsung, gejala harga *volatile food* dapat memengaruhi biaya pada komoditas makanan jadi, yang menggunakan bahan mentah kelompok *volatile food* sebagai salah satu bahan baku, sehingga berdampak pada peningkatan harga makanan jadi. Secara tidak langsung, kenaikan harga *volatile food* memberikan dampak lanjutan melalui ekspektasi inflasi, terutama jika harganya melonjak signifikan sehingga mendorong kenaikan harga komoditas lainnya. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait terutama dalam menjaga ketersediaan barang-barang *volatile food* di seluruh daerah setiap saat.

Berdasarkan SBH 2012, terdapat 85 komoditas dengan bobot sebesar 16,62% yang masuk kedalam perhitungan *volatile food*, contohnya: beras, bawang merah, bawang putih, cabe, daging sapi, daging ayam, dan sebagainya. Berdasarkan grafik 3-5, diketahui bahwa rata-rata inflasi *volatile food* setelah periode ITF (2005-2015) cenderung tinggi yaitu sebesar 10,3%. Terjadinya perubahan iklim yang mengganggu produksi pertanian diduga menjadi penyebab utama tingginya inflasi di kelompok *volatile food*.

Grafik 3-3.
Pergerakan Inflasi Inti Periode 2002-2015



Grafik 3-4.
Pergerakan Inflasi Volatile Food Periode 2002-2015

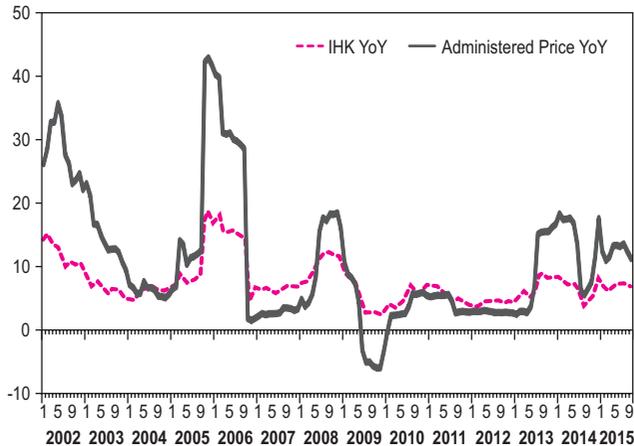


Pada kelompok *administered price* yang di dalamnya terdiri dari kelompok komoditas yang harganya diatur pemerintah, seperti BBM, tarif listrik dan LPG, memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan *volatile food*. Meskipun tingkat volatilitasnya lebih rendah tetapi tingkat inflasi kelompok *administered price* cenderung berada di atas inflasi IHK pada umumnya. Sama seperti gejala harga *volatile food* yang memengaruhi inflasi, gejala harga di kelompok *administered price* juga dapat memengaruhi pergerakan inflasi IHK secara signifikan. Contohnya, kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap inflasi. Dampak tersebut dapat terjadi melalui jalur tarif transportasi (*cost push*), baik untuk angkutan orang maupun barang serta melalui jalur ekspektasi. Kenaikan ekspektasi inflasi ketika akan terjadi kenaikan harga BBM umumnya telah timbul bahkan sebelum kebijakan kenaikan harga diimplementasikan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal memutuskan kapan dan berapa besaran kenaikan yang mungkin dalam kelompok *administered price*.

Pada periode setelah ITF diterapkan (2005-2015) rata-rata inflasi *administered price* tergolong cukup tinggi yaitu 9,04%. Hal ini disebabkan Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penghapusan ataupun

pengurangan subsidi bahan bakar sejak setelah orde baru, juga pengaturan besaran tarif dasar listrik, dan kebijakan lain yang berpengaruh terhadap perubahan harga barang dan jasa.

Grafik 3-5.
Pergerakan Inflasi *Administered Price* Periode 2002-2015



3.3. Inflasi Daerah

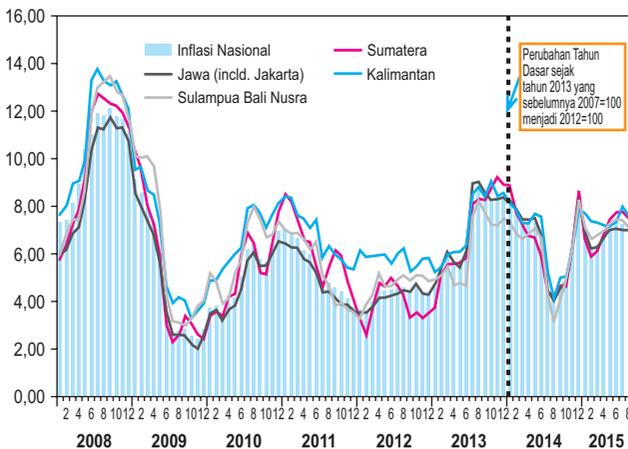
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Di Indonesia, perkembangan inflasi nasional tidak terlepas dari dinamika perkembangan inflasi yang terjadi di daerah. Hal ini disebabkan karena inflasi nasional merupakan hasil penggabungan (agregasi) dari inflasi di daerah dengan pembobotan tertentu.¹⁵ Pada saat ini, penghitungan inflasi nasional oleh BPS (Badan Pusat Statistik) didasarkan atas inflasi di 82 kota dengan bobot terbesar berada di Jawa yakni 64,08%.

Di level daerah, sumber tekanan inflasi sangat tergantung dan dipengaruhi karakteristik daerah masing-masing. Secara umum, inflasi di beberapa daerah cenderung berada di atas inflasi nasional terutama pada periode 2008-2015. Perkembangan inflasi di Jawa cenderung berada di bawah inflasi nasional,

¹⁵ Pembobotan dihitung berdasarkan dari Nilai Konsumsi (NK) di suatu daerah yang secara sederhana mencerminkan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah.

sementara daerah di luar Jawa justru berada di atas inflasi nasional, terutama di Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Daerah-daerah kawasan Timur, seperti Kalimantan dan Sulampua Bali Nusra (Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara), tingkat inflasinya relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional. Perbedaan inflasi antardaerah mencerminkan adanya karakteristik sumber tekanan harga yang berbeda, antara lain, karena perbedaan kualitas infrastruktur logistik, kemampuan produksi pangan lokal, kebijakan *administered price* di daerah serta struktur pasar di daerah.

Grafik 3-6.
Dinamika Inflasi Daerah Indonesia Per Kawasan Periode 2008-2015



Grafik 3-6 memperlihatkan pergerakan inflasi di daerah per kawasan secara umum bergerak searah dengan pergerakan inflasi nasional. Dari pergerakan inflasi antarperiode waktu terlihat bahwa laju inflasi nasional cenderung berfluktuasi dengan penyebaran inflasi antardaerah yang relatif tinggi (heterogen). Pada umumnya, daerah yang terpencil (*remote*) dan tertinggal, seperti Kawasan Indonesia Timur maupun daerah yang pernah mengalami *idiosyncratic shocks* (bencana alam, konflik komunal, dan lain lain), menunjukkan kecenderungan inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah yang lebih maju dan berlokasi di sentra ekonomi seperti Jawa. Tingginya inflasi di kawasan Timur merupakan permasalahan yang

telah terjadi sejak lama, hal ini dikarenakan tingginya hambatan struktural dari sisi infrastruktur dan sistem logistik. Sementara itu, relatif tingginya laju inflasi di beberapa daerah di kawasan Sumatera, yang relatif lebih maju dan dekat dengan sentra ekonomi, lebih disebabkan oleh faktor lokal yang spesifik, seperti distribusi barang, terbatasnya infrastruktur dan dampak dari *shock* harga komoditas yang menjadi andalan daerah tersebut.

3.4. Determinan Inflasi Indonesia

Mohanty & Klau (2001) menyatakan, umumnya negara-negara *emerging* memiliki sejarah tingkat inflasi yang moderat hingga tinggi. Kondisi ini umumnya terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif dan depresiasi nilai tukar. Selain itu, inflasi di kelompok negara ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai *shock* dari eksternal dan internal. Namun, memasuki era 1990-an sebagian besar telah berhasil menurunkan tingkat inflasinya.

Sebagaimana negara *emerging* lainnya, tingkat inflasi Indonesia cenderung tinggi dan secara rata-rata¹⁶ mencapai 7,8%.¹⁷ Dari Grafik 3-8 terlihat rata-rata inflasi Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN-5. Sebelum krisis keuangan Asia, rata-rata inflasi Philipine lebih tinggi dibandingkan Indonesia (Grafik 3-8). Namun sesudah krisis, rata-rata inflasi Indonesia lebih tinggi.

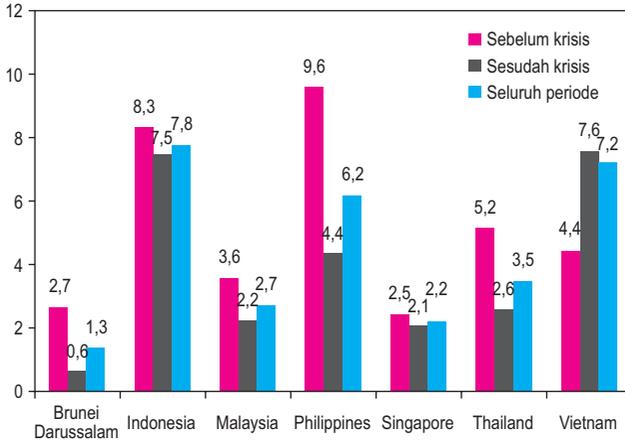
Rumbaugh (2012) menyatakan terdapat beberapa karakteristik yang menjelaskan mengapa inflasi Indonesia lebih tinggi dari negara *emerging* lainnya di Asia,¹⁸ yaitu:

16 Rata-rata seluruh periode dari 1990 s.d 2014 dengan mengeluarkan periode krisis yaitu (1998 dan 1999).

17 Menurut Khan & Senhadji, *threshold* inflasi yang masih aman untuk negara *emerging* adalah $\leq 11\%$, namun nilai *threshold* inflasi untuk negara-negara Asia menurut Vinayagathan (2013) adalah 5,45%.

18 Negara-negara yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Indonesia, Korea, Malaysia, Philipine dan Thailand.

Grafik 3-7.
Rerata Inflasi Negara ASEAN-5 Sebelum dan Sesudah Krisis 1997/1998



1. Inersia / persistensi inflasi yang lebih tinggi

Analisis perilaku inflasi menunjukkan bahwa inflasi Indonesia bersifat sangat persisten. Perilaku tersebut terutama disebabkan oleh pola pembentukan ekspektasi inflasi yang masih didominasi inflasi masa lalu (ekspektasi adaptif). Pembentukan ekspektasi inflasi ini banyak diwarnai oleh inflasi *costpush* atau *supply shocks* yang tinggi dan sering terjadi, seperti kejutan harga minyak dunia, kenaikan harga BBM, depresiasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah serta kenaikan upah minimum yang melebihi inflasi (Hutabarat, 2005). Yanuarti (2008) menemukan bahwa persistensi inflasi menurun pada periode setelah krisis dibandingkan sebelumnya, namun menurut Gerlach & Tillman (2011) penurunan ini tidak terlalu signifikan dibandingkan negara-negara lainnya di Asia.

2. Dampak *output gap*¹⁹ terhadap inflasi lebih tinggi

Sebagaimana diketahui *output gap* merupakan salah satu faktor yang mendorong inflasi. Dalam kondisi *output* berada di atas *output* potensialnya (*output gap* positif), kenaikan *output gap* menggambarkan tekanan inflasi yang meningkat. Dengan menggunakan data panel 15 negara *emerging*,

¹⁹ *Output gap* adalah selisih antara *output* potensial dan *output* riil. *Output gap* merupakan indikator untuk menjelaskan inflasi dari sisi permintaan.

termasuk di dalamnya Indonesia, Domac & Yucel (2004) menemukan bahwa peningkatan *output* gap meningkatkan probabilitas timbulnya inflasi. Sementara itu, Rumbaugh (2012) menyatakan untuk peningkatan *output* gap yang sama, dampaknya terhadap inflasi lebih tinggi di Indonesia dibandingkan negara lainnya.

3. Korelasi yang kuat antara faktor stabilitas politik dan institusional dengan inflasi

Aisen dan Vega (2006)²⁰ menemukan adanya hubungan yang positif antara stabilitas politik dan volatilitas inflasi. Institusi yang lemah mempersulit upaya Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan menjaga inflasi yang rendah secara konsisten. Faktor politik dan institusional memberikan pengaruh yang berbeda terhadap inflasi di setiap negara. Rumbaugh (2012) menemukan bahwa dibandingkan negara-negara Asia lainnya dalam sampel, faktor politik dan insitusional terhadap inflasi di Indonesia lebih kuat.

Selain ketiga faktor tersebut di atas, beberapa penelitian juga mengulas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inflasi Indonesia. Secara umum, inflasi di Indonesia dapat disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, baik dari sisi permintaan, penawaran, maupun dari ekspektasi. Kontribusi dari masing-masing faktor yang memengaruhi inflasi tersebut tidak selalu sama dari waktu ke waktu.

Dari sisi permintaan, peningkatan jumlah uang beredar dalam beberapa periode terbukti memiliki korelasi dengan laju inflasi seperti yang terjadi pada periode 1960 dan 1970-an. Pada periode 1960, peningkatan jumlah uang beredar disebabkan oleh kebijakan defisit anggaran. Di awal 1970, peningkatan uang beredar disumbang oleh meningkatnya penerimaan pemerintah dari minyak. Ramakrishnan dan Vamvakidis (2002) menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hasil serupa terkait hubungan yang kuat antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi di Indonesia juga dikonfirmasi oleh Listiani (2006) dan Anugrah (2011).

Selain jumlah uang beredar, faktor nilai tukar juga memiliki dampak signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Depresiasi nilai tukar mendorong kenaikan inflasi melalui peningkatan harga domestik, terutama dari produk dengan konten impor.

20 Aisen dan Vega menggunakan data panel 100 negara di Asia Pacific dan termasuk di dalamnya Indonesia.

Hasil empiris beberapa penelitian membuktikan bahwa determinan utama inflasi Indonesia adalah nilai tukar (Siregar & Rajaguru 2002; Wimanda 2006; Anugrah 2011). Bahkan, Ramakrishnan dan Vamvakidis (2002) menyatakan bahwa nilai tukar dan *imported inflation* adalah kontributor utama inflasi Indonesia dan dengan daya prediksi yang kuat. Kuatnya pengaruh nilai tukar terhadap inflasi tercermin dari nilai *exchange rate pass-through*.²¹ Walaupun nilai tukar juga memengaruhi inflasi di beberapa negara Asia lainnya seperti Korea dan Thailand, namun tingkat *pass-through* di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kedua negara tersebut (Ito & Sato, 2006).²²

Hasil empiris dari penelitian Kurniati (2007) menyatakan bahwa *pass-through* tingkat pertama (*first stage pass-through*) dari nilai tukar kepada indeks harga barang impor menunjukkan peningkatan pada periode sesudah krisis.²³ Sebaliknya, *second stage pass-through* yaitu dari indeks harga impor kepada IHK menunjukkan penurunan cukup signifikan. Menurunnya respon IHK terhadap indeks harga impor memberikan implikasi bahwa bank sentral tidak perlu merespond secara agresif *shock* nilai tukar yang bersifat temporer dan memberikan ruang yang lebih luas bagi bekerjanya mekanisme pasar untuk penentuan nilai tukar.

Faktor lain yang memengaruhi inflasi di Indonesia dari sisi permintaan adalah permintaan musiman. Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Pakistan, Indonesia memiliki dampak inflasi yang lebih tinggi dalam triwulan di mana Idul Fitri berlangsung (Hutabarat, 2005). Wimanda dkk (2010) juga mengkonfirmasi bahwa faktor hari raya Idul Fitri menjadi salah satu determinan inflasi. Berdasarkan survei mekanisme pembentukan harga pada tahun 2001, tambahan inflasi pada periode Idul Fitri terutama disebabkan oleh tingginya permintaan dan kecenderungan perilaku permintaan yang kurang elastis terhadap harga pada periode tersebut. Penyebab lainnya adalah faktor dorongan pesaing yang menaikkan harga. Sementara itu, keterbatasan pasokan bukan penyebab utama kenaikan harga pada periode tersebut.

Faktor penawaran juga berperan penting dalam pembentukan inflasi di Indonesia. Termasuk dalam faktor inflasi dari sisi penawaran adalah peningkatan biaya *input* (*cost push inflation*). Kenaikan biaya ini dapat disebabkan oleh

21 *Exchange rate pass through* adalah transmisi dari pergerakan nilai tukar terhadap tingkat harga domestik.

22 Sampel dari penelitian ini adalah negara-negara di Asia termasuk Indonesia.

23 Nilai dari *first-stage pass-through*, yaitu dari nilai tukar ke harga import meningkat dari 0,35 sebelum krisis menjadi 0,45 setelah krisis.

kenaikan upah dan juga akibat kenaikan harga barang tertentu yang diatur Pemerintah (*administered price*), seperti kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Terkait dengan upah pekerja, Cadarajat dkk (2008) menyatakan bahwa untuk hasil *full sample*²⁴ inflasi belum signifikan dipengaruhi oleh upah pekerja namun inflasi memengaruhi upah pekerja. Dengan menggunakan sampel periode setelah krisis, ditemukan kausalitas dua arah di mana upah juga memengaruhi inflasi.

Ridwan dkk (2013) dengan menggunakan data panel propinsi menemukan bahwa variabel upah turut berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Respon kenaikan upah terhadap kenaikan inflasi terjadi secara gradual dan memerlukan waktu. Kenaikan inflasi akan direspon dengan kenaikan upah melalui kebijakan kenaikan UMR oleh Pemerintah. Kenaikan upah tersebut, sebagaimana hasil survey terutama mengenai perilaku penetapan harga, pada tahap tertentu akan direspon oleh perusahaan dengan menaikkan harga jual produknya sehingga mengakibatkan inflasi kembali meningkat. Dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi akan sulit untuk mempertahankan *unit labour cost* (ULC) yang rendah. Selanjutnya, peningkatan ULC tersebut akan kembali memengaruhi tingkat inflasi pada periode berikutnya (*second-round inflation*).

Prastowo, dkk (2010) mengelompokkan tiga jenis kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap harga jual barang dan jasa. *Pertama*, kebijakan *administered prices* seperti harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), harga telepon dan air bersih. *Kedua*, kebijakan tarif cukai (pajak) untuk beberapa komoditas domestik, seperti produk rokok dan produk audio-video. Kebijakan tarif juga dapat dikenakan kepada komoditas yang diimpor dari luar negeri melalui penetapan bea masuk dan pajak impor. *Ketiga*, kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) terutama untuk produk farmasi atau obat-obatan. Dari ketiga jenis kebijakan Pemerintah tersebut kebijakan *administered price*, khususnya kenaikan harga BBM, dirasakan paling signifikan karena berpengaruh terhadap seluruh sektor dan terjadi lebih dari satu putaran. Kenaikan harga BBM juga berdampak pada biaya produksi listrik yang selanjutnya akan mendesak peningkatan TDL. Hal itu disebabkan banyaknya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berbahan bakar solar. Kenaikan harga BBM secara langsung akan meningkatkan biaya transportasi dan menaikkan biaya distribusi barang sehingga mendorong peningkatan harga barang.

24 Full sampel dari 1984 s.d 2007

Kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik terbukti secara empiris memengaruhi inflasi. Arimurti dkk (2012) dengan menggunakan matriks Leontief dan model *Input Output* menghitung perbedaan besaran inflasi atas dua alternatif kebijakan Pemerintah yaitu peningkatan harga BBM dan pemberian subsidi tetap kepada konsumen. Keduanya memberikan dampak inflasi dengan besaran yang berbeda.²⁵ Sementara itu, Utari & Nurliana (2012)²⁶ menemukan bahwa peningkatan tarif dasar listrik (TDL) akan berdampak pada inflasi secara langsung akibat peningkatan harga listrik yang dirasakan konsumen, dan secara tidak langsung akibat peningkatan harga barang yang dalam proses produksinya menggunakan listrik.

Faktor Inflasi dari sisi penawaran juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran (*supply shock*), seperti gagal panen, bencana alam, dan gangguan distribusi sehingga distribusi tidak lancar, serta adanya kerusuhan sosial yang berakibat terputusnya pasokan dari luar daerah. Gangguan tersebut akan memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan dan pada akhirnya akan meningkatkan laju inflasi.

Prastowo, dkk (2008) meneliti pergerakan harga 5 komoditas *volatile food*, yaitu cabe merah, daging sapi, beras, gula pasir, dan minyak goreng selama periode 1993-2007. Hasil empiris menyimpulkan bahwa tekanan harga pada kelompok ini dipicu oleh kelangkaan pasokan karena siklus tanam, gangguan cuaca, serangan hama penyakit, dan gangguan distribusi. Sifat beberapa komoditas pertanian yang mudah busuk (*perishable*) juga menyebabkan harga jualnya cenderung berfluktuasi. Semakin *perishable* suatu komoditas, maka semakin berfluktuasi harganya. Hal ini mengingat komoditas tersebut tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama untuk stabilisasi stok sehingga sangat rentan terhadap *supply shocks*, baik yang berasal dari faktor produksi maupun distribusi. Di sisi lain, permintaan masyarakat akan produk komoditi *perishable* yang diawetkan, seperti dikeringkan atau dibekukan, masih rendah. Akibatnya, harga jual produk pertanian dan volatilitasnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan barang yang terkait erat dengan siklus tanam maupun faktor cuaca.

25 Arimurti dkk menguji dampak kenaikan harga BBM sebesar Rp1500/l dan pemberian subsidi tetap sebesar Rp2000/l terhadap inflasi. Kenaikan sebesar Rp1500/l memberikan dampak inflasi sebesar 1,71-3,11%. Sementara pemberian subsidi tetap berdampak pada kenaikan inflasi sebesar 1,75 – 3,33%.

26 Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan TDL sebesar 10% akan meningkatkan inflasi dalam kisaran 0,27-0,30% dan dampak tidak langsung akibat kenaikan harga adalah sebesar 0,09-0,12%.

Ridwan, dkk (2013) menyoroti permasalahan *supply shocks* dari aspek distribusi. Secara umum, terdapat kesamaan permasalahan pada komoditas pangan strategis di Indonesia dilihat dari aspek distribusi. *Pertama*, permasalahan distribusi antarwaktu karena komoditas pangan yang pada umumnya bersifat musiman (*seasonal*). Dengan kondisi tersebut, harga komoditas cenderung anjlok saat musim panen raya karena pasokan yang melimpah. Sebaliknya, dalam masa tidak panen (*paceklik*) harga akan melambung tinggi karena pasokan yang menurun. Beberapa komoditas pangan yang sifat musimannya sangat dipengaruhi oleh perubahan musim/cuaca, terutama adalah beras, gula pasir dan bawang merah. Oleh karenanya, untuk komoditas yang bersifat musiman, manajemen *stock* memegang peranan penting.

Selain disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran, inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi. Ekspektasi tersebut terkait dengan ekspektasi masyarakat dalam pembentukan harga dan upah. Seperti telah dijelaskan, ekspektasi dapat bersifat adaptif (*backward expectation*) maupun ekspektasi berdasarkan informasi dan kebijakan ke depan (*forward expectation*). Sejumlah riset mengenai ekspektasi inflasi menunjukkan bahwa perilaku ekspektasi sebagian besar masyarakat, khususnya pelaku pasar barang, masih bersifat adaptif atau menengok ke belakang (*backward looking*) dengan mengacu pada inflasi terkini dan masa lalu.

Ekspektasi inflasi pelaku ekonomi yang bersifat adaptif teramati dari pergerakan ekspektasi inflasi pengusaha yang di awal tahun cenderung mendekati target yang diumumkan Bank Indonesia, namun dalam pergerakannya di sepanjang tahun lebih mengacu pada realisasi inflasi (Hutabarat, 2005). Sementara itu, Wimanda, dkk (2011) menyatakan bahwa inflasi IHK Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh ekspektasi adaptif dan ekspektasi ke depan. Namun demikian, bobot dari ekspektasi adaptif lebih tinggi dibandingkan ekspektasi ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi Indonesia tergolong persisten. Hanya saja, Harmanta, dkk (2010) menyatakan bahwa ekspektasi inflasi masyarakat mengindikasikan kecenderungan yang bersifat *forward looking* namun dengan horizon yang singkat.

4. PENGENDALIAN INFLASI DI INDONESIA

4.1. Kebijakan Moneter untuk Pengendalian Inflasi

Sebagaimana diketahui, tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang terkendali. Dalam implementasinya, laju inflasi yang rendah dan stabil diwujudkan dalam bentuk pencapaian target inflasi. Dalam hal ini kebijakan moneter diarahkan untuk dapat meminimalkan berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan tekanan inflasi termasuk tekanan yang berasal dari nilai tukar.

Kerangka kerja kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia sampai dengan tahun 2004, menggunakan besaran moneter (*monetary based*) sebagai sasaran antara (*intermediate target*), baik itu berupa M1 atau uang beredar dalam arti sempit maupun M2 atau uang beredar dalam arti luas. Sementara itu, untuk mencapai target berupa uang beredar (M1 dan atau M2) tersebut, Bank Indonesia menggunakan uang primer (M0) sebagai sasaran operasional.

Krisis tahun 1998 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian Indonesia, terutama di sektor keuangan dan perbankan. Perubahan ini terjadi karena inovasi dan perkembangan yang sangat pesat di sektor keuangan dan perbankan. Dengan perubahan tersebut, berbagai asumsi yang dipergunakan dalam kerangka kebijakan moneter dengan *monetary based targeting* menjadi tidak dapat digunakan lagi, karena kebijakan moneter menjadi kurang atau tidak efektif lagi.

Dilatarbelakangi keinginan untuk memperkuat kebijakan moneter, pada pertengahan 2005 diimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter dengan sasaran akhir kestabilan harga (*inflation targeting framework, ITF*) yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Penerapan ITF dirasakan mendesak mengingat kerangka kebijakan *base money targeting* yang tidak atau kurang efektif dalam mengendalikan inflasi dan atau *base money* (uang primer).

Kerangka ITF memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: i) Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target inflasi yang diumumkan secara eksplisit ke masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dalam kaitan ini

target inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia; ii) Kebijakan moneter diterapkan secara *forward looking*, dengan merespon terhadap perkembangan inflasi; dan iii) Kebijakan moneter dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Kerangka kebijakan ini mencakup empat elemen dasar, yaitu: i) penggunaan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan; ii) proses perumusan kebijakan moneter yang antisipatif; iii) strategi komunikasi yang lebih transparan; dan iv) penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah.

Sejak penerapannya pada tahun 2005, kerangka kerja *Inflation Targeting* (ITF) telah dapat melalui berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan-tantangan tersebut diawali dengan *mini crisis* pada tahun 2005, krisis global pada tahun 2008, hingga periode aliran masuk modal asing yang deras pasca krisis global serta diakhiri dengan tekanan aliran keluar modal asing pada tahun 2011.

Selain itu, pengalaman menghadapi krisis global memberi pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan moneter. *Pertama*, dalam perekonomian terbuka, kebijakan moneter dihadapkan pada berbagai tantangan sehingga instrumen yang digunakan perlu berupa bauran instrumen (*instrument mix*). *Kedua*, krisis global menunjukkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi juga dapat bersumber dari sektor keuangan. *Ketiga*, perlunya secara jelas menempatkan posisi nilai tukar dalam kerangka ITF. Berbagai pelajaran tersebut mendorong perlunya penyempurnaan strategi ITF ke depan. Penyempurnaan tersebut juga sebagai jawaban atas tuntutan *stakeholders* terhadap peningkatan kredibilitas Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi.

Berdasarkan hasil kajian, penerapan *enhanced ITF* merupakan format yang ideal untuk perekonomian Indonesia. Bank Indonesia secara tersirat sebenarnya sudah menerapkan “*enhanced*” ITF, yang berarti bahwa dalam jangka pendek Bank Indonesia berupaya untuk menstabilkan perkembangan inflasi dan ekonomi riil bersama-sama. Susbtansi *enhanced* dari ITF tercermin pada orientasi pencapaian tujuan akhir kebijakan yaitu inflasi, namun dengan tetap memperhitungkan dinamika perkembangan variabel ekonomi makro dalam jangka pendek, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan perkembangan sektor keuangan. Instrumen kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi adalah melalui: i) kebijakan

suku bunga; ii) kebijakan nilai tukar; iii) bauran kebijakan makroprudensial dan moneter; serta iv) komunikasi kebijakan moneter.

4.2. Metode Penetapan Sasaran Inflasi di Indonesia

Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran inflasi. Hal itu kemudian ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut, Gubernur Bank Indonesia dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menandatangani Nota Kesepakatan Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (Siaran Pers No.6/75/BGub/Humas).

Nota kesepakatan itu dimaksudkan sebagai rujukan bagi penetapan sasaran inflasi. Selain itu, hal yang paling penting dalam kesepakatan ini adalah adanya kesepahaman akan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Nota kesepakatan ini, antara lain, bertujuan untuk: i) mengatur proses koordinasi dan menentukan peran dan tanggung jawab Pemerintah dan Bank Indonesia dalam penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi; ii) membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi di masa datang (*inflation expectation*); iii) memberikan pedoman kepada pelaku pasar dan pembuat kebijakan dalam rangka mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan; iv) memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai komitmen bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil; dan v) mewujudkan terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi.

Dalam nota kesepakatan tersebut jenis sasaran inflasi yang akan ditetapkan Pemerintah dapat berupa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Inflasi Inti (*Core Inflation*) dengan bentuk dapat berupa: i) kisaran (*range*); ii) titik (*point*); atau iii) titik dengan toleransi (*point with deviation*). Inflasi IHK (*headline inflation*) adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu

tertentu. Sementara Inflasi Inti (*core inflation*) adalah bagian Inflasi IHK yang lebih bersifat persisten. Inflasi Inti diukur dengan mengeluarkan unsur perubahan harga yang diatur Pemerintah (*administered price*) dan harga yang bergejolak (*volatile*) sebagai akibat gangguan pasokan karena musim, sistem distribusi, dan bencana alam.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bank Indonesia mengajukan usulan sasaran inflasi kepada Pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun berikutnya. Setelah dibahas bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pemerintah menetapkan sasaran inflasi untuk jangka waktu tiga tahun berikutnya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sasaran inflasi yang telah ditetapkan tersebut diumumkan kepada publik agar dapat menjadi jangkar (*anchor*) ekspektasi inflasi bagi masyarakat.

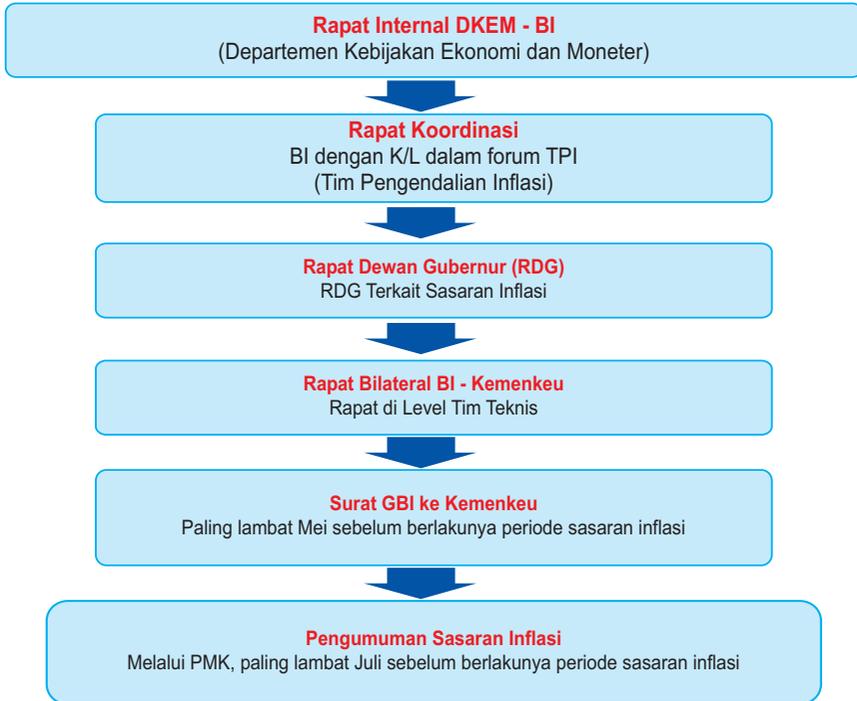
Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013-2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi $\pm 1\%$. Sasaran inflasi untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 telah ditetapkan dalam PMK No 93/PMK.011/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan besaran sasaran inflasi masing-masing adalah 4,0%, 4,0%, dan 3,5% masing-masing dengan deviasi $\pm 1\%$.

Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan tersebut melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu (*anchor*) pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Angka target atau sasaran inflasi dapat dilihat pada *website* Bank Indonesia atau *website* instansi Pemerintah lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Kantor Menko Perekonomian, atau Bappenas.

Sebelumnya, berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setelah dilakukan amandemen sehingga menjadi UU No.3 Tahun 2004, kewenangan menetapkan sasaran inflasi berada di tangan Pemerintah. Amandemen itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi.

Secara umum, alur koordinasi penetapan sasaran inflasi nasional oleh pemerintah dan Bank Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4-1.

Gambar 4-1.
Alur Penetapan Sasaran Inflasi



Dalam penetapan sasaran inflasi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dan Bank Indonesia yakni:

1) **Karakteristik Inflasi**

Peran sisi *supply* sangat dominan dalam memengaruhi inflasi Indonesia. Dalam 20 tahun terakhir, inflasi terendah mencapai sekitar 5% (kecuali tahun 2009), didukung oleh (i) terjaganya pasokan bahan pangan pokok, dan (ii) minimalnya kenaikan *administered prices*. Inflasi inti yang mencerminkan sisi *demand* dalam satu dekade terakhir berada dalam tren menurun. Selain itu, persistensi inflasi masih cukup tinggi (sekitar 0,8 – 0,9).

2) Transmisi Kebijakan Moneter

Pengendalian inflasi dengan kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh transmisi kebijakan moneter. Hasil empiris menunjukkan sensitivitas inflasi terhadap BI Rate relatif kecil, terutama dalam situasi eksekusi likuiditas. Dinamika inflasi masih dipengaruhi secara signifikan oleh siklus perkembangan besaran moneter. Lag kebijakan moneter sekitar 4 – 6 triwulan.

3) Faktor Risiko

Inflasi Indonesia dipengaruhi oleh faktor risiko, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, faktor risiko berasal dari tingginya ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh pada harga komoditas dan nilai tukar. Sementara dari sisi domestik, faktor risiko di antaranya berasal dari masih tingginya ketidakpastian kebijakan energi nasional dan proyek infrastruktur

4) Kredibilitas Bank Indonesia

Kemampuan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan memengaruhi kredibilitas kebijakan yang diambil. Dalam kurun waktu 9 tahun (2005 – 2014) sejak implementasi *Inflation Targeting Framework*, sebanyak 2 kali inflasi berada dalam rentang sarannya, yaitu 2007 dan 2012. Hasil asesmen menyebutkan secara umum, Bank Indonesia dipandang cukup kredibel, terkecuali pada periode adanya kenaikan *administered prices* (BBM).

4.3. Tantangan Pengendalian Inflasi

Pencapaian suatu target inflasi dengan tingkat fluktuasi yang minimal, merupakan kerangka dasar tujuan kebijakan ekonomi makro di berbagai negara maju dan berkembang. Inflasi yang rendah dan stabil mencerminkan stabilitas kondisi ekonomi makro. Faktor ini sangat penting bagi terselenggaranya proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Sejauh ini karakteristik inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-moneter. Di tingkat daerah, peran inflasi daerah di luar Jakarta terhadap inflasi nasional sangat besar dengan karakteristik daerah yang berbeda. Karakteristik ekonomi yang berbeda antardaerah menyebabkan adanya implikasi yang berbeda dari setiap kebijakan makro. Selain itu, disparitas antardaerah juga masih cukup besar dilihat dari sisi harga, inflasi, pendapatan masyarakat maupun akses terhadap sektor keuangan.

Dari hasil penelitian,²⁷ karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang utamanya dipengaruhi oleh sisi *supply* berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas bagi daerah dalam proses pembangunan, juga berpengaruh dalam perumusan kebijakan moneter kedepan yang harus semakin mempertimbangkan aspek spasial. Permasalahan kelancaran distribusi dan pasokan barang kerap kali menjadi pemicu utama terjadinya gejolak harga. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis nasional yang belum didukung oleh infrastruktur konektivitas yang memadai.

Di Indonesia, kendala struktural di sektor riil kerap menimbulkan ketidakstabilan harga. Kendala struktural tersebut seperti disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia²⁸ adalah:

- (i) Terbatasnya kapasitas produksi di dalam negeri, khususnya komoditas pangan strategis, karena produktivitas yang rendah dan luas lahan yang semakin menyusut. Beberapa komoditas pangan masih mengandalkan tambahan impor. Hal ini juga diperburuk dengan belum adanya instrumen stabilisasi harga strategis.
- (ii) Nilai tukar Rupiah yang rentan terhadap gejolak eksternal karena masih tingginya ketergantungan pada ekspor berbasis sumber daya alam dan bahan baku impor.
- (iii) Produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan karena perubahan iklim yang semakin sulit diantisipasi.
- (iv) Masih tingginya ketergantungan energi nasional pada impor BBM dan LPG.

27 Paper “Dinamika dan Heterogenitas Inflasi Regional di Indonesia”, M.H.A Ridhwan et al, 2013, Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia.

28 Pidato Gubernur Bank Indonesia dalam Rakornas VI TPID 2015.

- (v) Pasar yang tidak efisien sebagaimana tercermin pada rantai distribusi yang panjang dan didominasi oleh segelintir pelaku besar. Di beberapa kelompok komoditas khususnya bahan pangan, struktur pasar cenderung kurang kompetitif dengan dominasi pada kelompok pelaku tertentu sehingga harga di pasar tidak efisien.
- (vi) Masih lemahnya konektivitas antardaerah. Logistik belum memadai sehingga sangat diperlukan infrastruktur pelabuhan yang memadai agar perdagangan antardaerah semakin intensif terutama karena kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan.

Selain dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, permasalahan inflasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah yang unik sehingga seringkali membutuhkan penanganan tersendiri. Sebagai contoh, masih terbatasnya arus informasi di antara pelaku ekonomi, tingginya ketergantungan pasokan antara satu daerah dan daerah lainnya, serta belum optimalnya proses sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi. Permasalahan serta karakteristik suatu daerah juga saling terkait dengan daerah lainnya, sehingga penanganannya memerlukan sinergi kebijakan, baik antara daerah dan daerah lain, daerah dengan pusat, maupun di tingkat pusat dengan pusat.

Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak bisa hanya direspon oleh kebijakan moneter semata yang merupakan tugas bank sentral. Untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil perlu dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi gangguan dari sisi *supply*, termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi. Diperlukan koordinasi yang intensif dan partisipatif di berbagai sektor, lintas Kementerian, serta melibatkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagai contoh koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral dapat memengaruhi inflasi inti adalah ketika kebijakan moneter melalui manajemen sisi permintaan dan stabilisasi kurs didukung penuh oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan sektoral yang meningkatkan kapasitas perekonomian. Pengendalian inflasi *administered priced* akan sangat efisien apabila kebijakan fiskal Pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral

terkait besaran dan *timing* penyesuaian harga BBM, TDL, LPG, rokok, tarif angkutan, tarif tol, Puskesmas, tarif PAM, dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pengendalian inflasi *volatile food* sangat perlu didukung oleh kebijakan sektoral yang mendukung kelancaran pasokan dan distribusi bahan pangan yang rentan terhadap gejolak/*shocks*. Koordinasi serta komitmen yang kuat antar pemegang kebijakan tersebut sangat penting dilakukan, yang pada akhirnya akan memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi yang dilakukan oleh bank sentral.

Selain perlunya koordinasi antar pemegang kebijakan di level pusat, pengendalian inflasi di Indonesia secara nasional juga perlu mendapat dukungan dari daerah. Hal ini mengingat inflasi nasional dibentuk oleh hampir 81% inflasi daerah (di luar Jakarta), dan merupakan hasil agregasi dari inflasi sejumlah 82 kota di Indonesia. Bobot yang besar pada kota-kota di luar Jakarta merupakan cermin dari besarnya peran daerah dalam pembentukan inflasi nasional. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan dengan kondisi geografis yang berbeda juga menyebabkan faktor dan pola yang memengaruhi pembentukan harga antardaerah menjadi beragam. Oleh karenanya, upaya pengendalian inflasi dalam rangka menciptakan stabilitas harga di tingkat nasional hanya dapat diwujudkan jika stabilitas harga terjadi pada tingkat daerah.

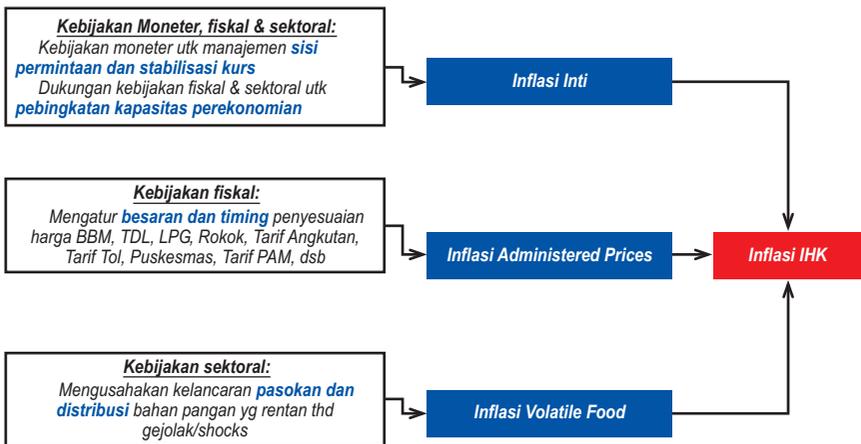
4.4. Mekanisme Kerja Pengendalian Inflasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara umum, tekanan inflasi di Indonesia dipengaruhi baik dari sisi *supply (cost push inflation)*, sisi *demand (demand pull inflation)* maupun ekspektasi inflasi. Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan diperlukan bauran kebijakan yang komprehensif dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta kebijakan sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya diperlukan koordinasi yang kuat antarotoritas, baik ditingkat pusat maupun daerah, seperti yang disajikan pada Gambar 4-2.

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI) sejak tahun 2005 dan Pokjanas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) di level pusat sejak tahun 2011. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan beberapa kementerian terkait di Pemerintah

Pusat, yakni: (1) Kementerian Keuangan, (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (4) Badan Urusan Logistik, (5) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Kementerian Perhubungan, (7) Kementerian Pertanian, (8) Kementerian Perdagangan, dan (9) Biro Pusat Statistik. Sedangkan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran pengendalian inflasi. Pokjanas TPID merupakan sinergi dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 4-2.
Koordinasi Pengendalian Inflasi

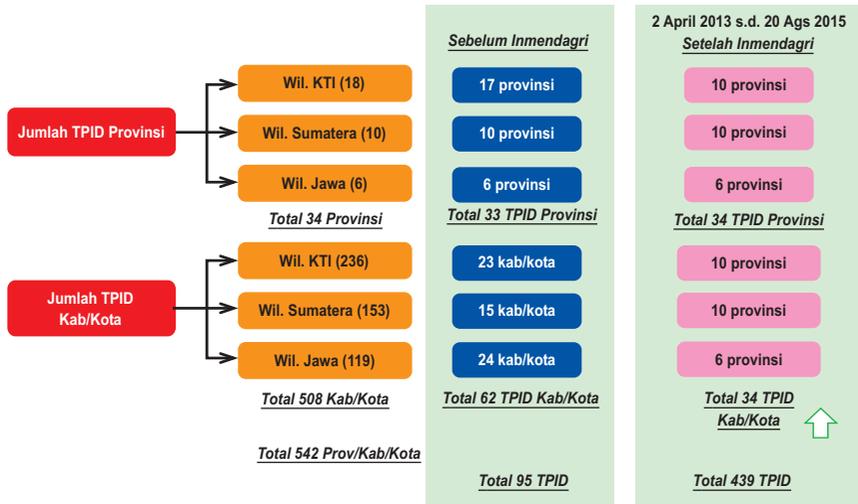


Mengingat peran koordinasi tidak hanya penting di level pusat tetapi juga daerah, maka sejak tahun 2008 koordinasi pengendalian inflasi diperluas hingga ke level daerah yang beranggotakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) sejak tahun 2008. Pembentukan TPID didasari pada kenyataan bahwa pengendalian inflasi daerah memegang peranan penting untuk mencapai inflasi nasional yang rendah dan stabil.

Sejak dibentuk pada tahun 2008, TPID berkembang sangat pesat dan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat penyelenggaraan Rakornas TPID yang pertama di Bali tahun 2010, tercatat 38 kota yang telah

memiliki TPID. Pada tahun 2011, dari total 66 kota yang menjadi dasar penghitungan inflasi di Indonesia oleh BPS, telah terbentuk TPID di 55 kota/kabupaten. Pada tahun 2013, jumlah TPID berkembang mencapai 183. Pertumbuhan TPID di kabupaten/kota di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, telah terbentuk TPID di 33 provinsi dan 168 kabupaten/kota atau 337 TPID. Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2015 jumlah TPID yang telah terbentuk secara formal (melalui Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) adalah sebanyak 439 TPID (34 TPID Provinsi dan 405 TPID Kab/Kota) yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari dukungan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 027/1696/SJ Tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa Di Daerah yang menjadi acuan bagi pembentukan TPID di daerah.

Gambar 4-3.
Perkembangan Jumlah TPID



Semakin luasnya keberadaan TPID memberikan optimisme terhadap terciptanya stabilitas harga, mengingat kendala-kendala yang kerap memicu inflasi di daerah hanya dapat diatasi melalui kebijakan yang bersifat lintas sektor dan lintas daerah. Hal ini perlu diimbangi dengan penguatan koordinasi

pusat-daerah sehingga dapat secara efektif mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.

Dalam rangka mencapai dan menjaga stabilitas inflasi di daerahnya, TPID bertugas untuk:

- 1) Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian, khususnya bahan pokok;
- 2) Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung poin 1;
- 3) Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien;
- 4) Mengelola dampak penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, stok, dan harga;
- 6) Melakukan koordinasi intensif antar SKPD, KPw Bank Indonesia, Kantor K/L terkait di daerah, untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok;
- 7) TPID sebagai wadah koordinasi pengendalian inflasi di daerah.

Setelah terbentuk, TPI dan TPID dalam perjalanannya saling berkoordinasi dalam rangka pengendalian inflasi di level pusat dan level daerah. Koordinasi antara tim pengendali inflasi di level pusat dan tim pengendali inflasi daerah dilakukan melalui kelompok kerja nasional (Pokjanas) TPID. Pokjanas TPID bertujuan untuk: (i) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung upaya stabilisasi harga di daerah; (ii) sinergi sumber daya dalam rangka koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan inflasi daerah; dan (iii) pertukaran data dan informasi yang terkait dengan upaya stabilisasi harga di daerah. Di sisi lain, dengan meningkatnya jumlah TPID secara signifikan, diperlukan strategi untuk memperkuat koordinasi, baik di antara TPID maupun antara TPID dan Pokjanas TPID dan TPI.

Dalam rangka pengendalian inflasi di level propinsi, masing-masing TPID Kabupaten/Kota akan melakukan koordinasi melalui rapat koordinasi daerah. Hasil rapat koordinasi di level propinsi selanjutnya akan dibawa pada forum Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dalam rangka pengendalian inflasi

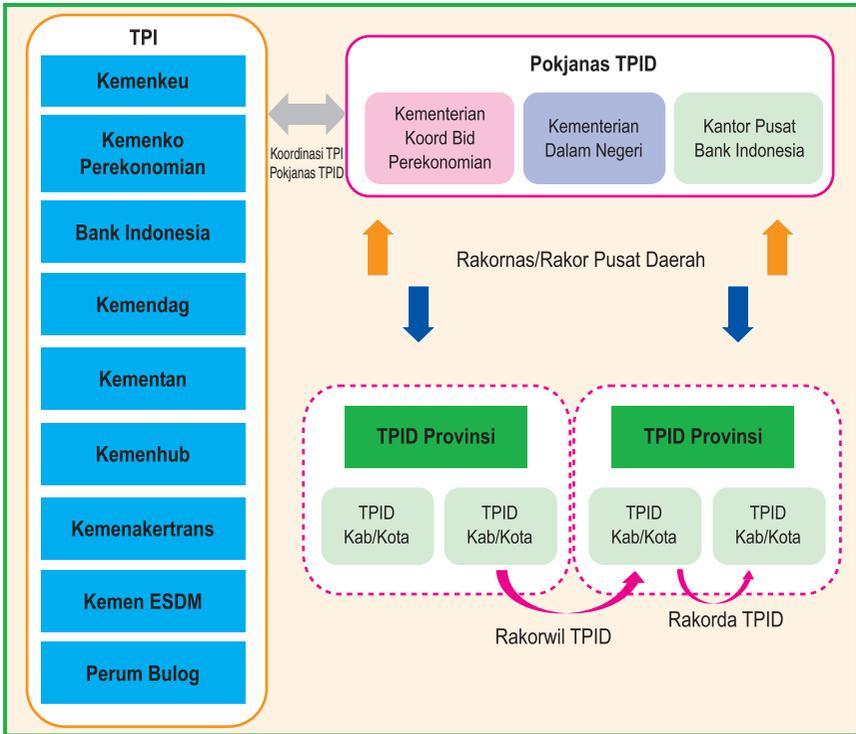
di level wilayah. Dalam perkembangannya, sejalan dengan upaya untuk mendorong kerja sama antardaerah dan dengan memperhatikan keterkaitan ekonomi antardaerah yang lebih kompleks, maka pertemuan lintas TPID diarahkan untuk tidak saja dilakukan antar TPID dalam satu wilayah tertentu. Forum koordinasi juga perlu dilakukan lintas wilayah, misalkan antara Jakarta dan Lampung, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Melalui mekanisme koordinasi ini, koordinasi antar TPID provinsi tidak hanya terbatas pada forum Rakorwil namun disesuaikan dengan kebutuhan dan program kerja masing-masing TPID provinsi.

Koordinasi serta pertukaran data pengendalian inflasi antara level pusat dan daerah yang diwakili oleh kelompok kerja nasional (Pokjanas) dan seluruh TPID dilakukan melalui rapat koordinasi nasional ataupun rapat koordinasi pusat dan daerah. Rapat koordinasi nasional merupakan forum koordinasi tertinggi TPID yang terdiri dari seluruh TPID di tingkat provinsi, kabupaten/kota, TPI Pusat dan Pokjanas TPID yang nantinya menghasilkan solusi dan langkah yang perlu ditempuh TPID atas permasalahan terkait stabilitas harga. Rumusan solusi yang disepakati bersama akan menjadi acuan dalam menetapkan arah program serta kebijakan TPID kedepan. Rakornas TPID hingga 2015 telah berlangsung sebanyak 6 kali semenjak dilaksanakan pertama kali pada tahun 2010.

Peran strategis Pokjanas TPID semakin dirasakan seiring bertambahnya jumlah TPID dan kompleksitas permasalahan yang memengaruhi stabilitas harga di daerah. Upaya stabilisasi harga membutuhkan usaha maksimal sehingga harmonisasi kebijakan lintas sektor, lintas kementerian, pemerintah pusat maupun daerah menjadi sangat penting. Berkembangnya jumlah TPID, membutuhkan penguatan mekanisme *business process* dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, hingga di level pusat yang dikoordinasikan oleh Pokjanas TPID.

Mekanisme koordinasi pengendalian inflasi di Indonesia dapat digambarkan melalui diagram berikut:

Gambar 4-4.
Mekanisme Koordinasi (Skema TPI-Pokjans TPID)



4.5. Hasil Koordinasi Pengendalian Inflasi

Melalui berbagai forum koordinasi, seperti Rakornas TPID, Rakor Pusat Daerah, Rakorwil TPID, dan forum-forum lain yang diinisiasi oleh TPID, berbagai program strategis diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan pengendalian inflasi daerah, baik masalah jangka pendek maupun yang bersifat struktural. Beberapa respon TPID tersebut, antara lain: meningkatkan akses informasi harga, mendorong implementasi kerja sama perdagangan antara daerah surplus dan daerah defisit, dan mendorong penyalarsan asumsi inflasi daerah agar sejalan dengan target sasaran inflasi di tingkat nasional. Terkait dengan kenaikan harga barang kelompok *administered price* seperti BBM bersubsidi, TPID mengupayakan pengelolaan dampak lebih lanjut dengan pengaturan kebijakan pengendalian tarif angkutan darat dan pengaturan

kelancaran distribusi bahan pokok bagi kelompok *volatile food*, serta turut berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan program perlindungan sosial yang diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

Di tingkat daerah, berbagai inovasi kebijakan turut berperan besar dalam pengendalian inflasi. TPI dan Pokjanas TPID bekerja sama dengan seluruh TPID terus melanjutkan program strategis guna meminimalkan tekanan inflasi secara berkelanjutan. Secara umum, fokus program pengendalian inflasi, baik di level pusat maupun daerah, diarahkan pada upaya menjaga dan melaksanakan 4K, yakni: (i) Ketersediaan barang dan jasa; (ii) Keterjangkauan harga; (iii) Kelancaran distribusi; dan (iv) Komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi masyarakat terhadap harga-harga.

Keberadaan TPI, Pokjanas TPID dan TPID telah memberikan dampak yang besar dalam pengendalian inflasi level nasional maupun daerah. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi yang pada akhirnya mampu mengatasi permasalahan penyebab inflasi daerah, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah-panjang.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh TPID dalam pengendalian inflasi seperti semboyan pengendalian inflasi 4K yang dilaksanakan, antara lain, adalah:

1. TPID mulai menyentuh upaya untuk mengatasi permasalahan struktural terkait dengan ketersediaan barang dan jasa. Sebagai contoh, TPID di Kalimantan Barat mampu memperkuat pasokan padi di daerahnya dengan cara memelopori perubahan metode penanaman padi yang menggunakan bibit 20-30 batang perlubang tanam. TPID di Pontianak mampu memperkuat pasokan bawang dan cabe merah di Pontianak dengan cara pengembangan kawasan dan pemberian bantuan bibit unggul bagi para petani. TPID Sumatera Utara mampu meningkatkan pasokan dan produksi beras setempat melalui pemberian fasilitas pembentukan lahan panen baru di Pulau Kampai Langkat. Upaya menjaga ketersediaan pasokan barang ini dilakukan guna pengendalian gejolak harga terutama menghadapi bulan Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
2. TPID mulai menyentuh upaya untuk mengatasi permasalahan terkait keterjangkauan harga di daerah, contohnya melalui program pasar penyeimbang. Pasar penyeimbang merupakan pasar alternatif yang sengaja dibuat di antara pasar yang sudah ada dengan menjual barang menggunakan harga normal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ekspektasi positif

masyarakat dan menjaga kemungkinan terjadinya permainan harga oleh pedagang. Selain itu, upaya menciptakan keterjangkauan harga dilakukan melalui program sinergi TPID dengan produsen dan retailer serta kerja sama TPID dengan sentra produsen (koperasi hortikultura lestari) dan retailer. Program ini salah satunya berupaya untuk memotong rantai distribusi pangan.

3. TPID mulai menyentuh permasalahan struktural terkait dengan kelancaran distribusi barang dan jasa terutama di kawasan Timur Indonesia melalui program efisiensi bongkar muat pelabuhan. Program ini meningkatkan jam operasional kegiatan bongkar muat pelabuhan menjadi 24 jam dan meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan untuk menunjang kegiatan bongkar muat. Sebagai contoh, TPID NTT mengidentifikasi bahwa produksi lokal bahan makanan di NTT sangat terbatas dan tergantung dari daerah lain. Distribusi dari daerah lain juga cenderung terhambat karena kondisi cuaca yang tidak mendukung mengingat jalur laut adalah transportasi utama menuju NTT. Selain itu, kapasitas bongkar muat sangat terbatas (10 box per jam). Dengan bongkar muat yang tidak efisien, biaya sewa meningkat yang pada akhirnya berimbas kepada harga yang dibebankan kepada masyarakat. Mengetahui permasalahan tersebut, TPID NTT melakukan program kerja jangka pendek dan jangka menengah. Program kerja jangka pendek yaitu berkoordinasi dengan pihak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan dan pengusaha sehingga dapat dilakukan penambahan jam kerja dari 10 jam menjadi 18 jam. Sedangkan program jangka menengah adalah mengajukan permohonan penambahan infrastruktur pelabuhan, yaitu peralatan bongkar muat di pelabuhan, kepada pemerintah daerah melalui surat ke Gubernur. Usaha yang dilakukan oleh TPID NTT pada akhir tahun 2012 sudah sangat dirasakan yaitu aktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) meningkat menjadi 18 jam serta terjadi peningkatan kapasitas bongkar muat peti kemas yang signifikan dengan adanya peralatan baru. Upaya ini pada akhirnya meningkatkan efisiensi distribusi dan berdampak kepada harga barang yang sesuai dengan harga keekonomiannya.
4. TPID mendorong peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antardaerah melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Terbatasnya akses informasi harga pangan merupakan salah satu faktor pendorong semakin tingginya perbedaan harga barang antardaerah. Dengan adanya PIHPS, maka transparansi serta pantauan

harga yang disajikan mampu menjadi panduan bagi TPID dalam mengambil kebijakan dan mengarahkan ekspektasi masyarakat. Sebagai contoh, melalui informasi harga bahan pokok, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memetakan kebutuhan serta meningkatkan distribusi komoditas bahan pokok dari kabupaten/kota produsen ke kabupaten/kota konsumen guna menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, dalam upaya menjaga ekspektasi masyarakat, TPID juga melakukan program sinergi kebijakan atasi inflasi musiman yang berupa komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan menjaga ekspektasi masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa pengendalian inflasi daerah dihadapkan pada permasalahan struktural yang membutuhkan solusi jangka menengah-panjang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Antar TPID juga penting untuk melakukan program strategis penguatan kerjasama antardaerah terkait distribusi, perdagangan serta pertukaran informasi dalam rangka mencapai serta memelihara kestabilan harga di daerahnya. Program kerja sama antardaerah akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam kerjasama terkait distribusi dan perdagangan, daerah penerima maupun pengeksport barang akan saling diuntungkan. Dengan adanya jaminan ketersediaan barang dari daerah pemasok maka kestabilan harga di daerah konsumen akan relatif terjaga. Demikian pula bagi daerah pemasok, dengan adanya jaminan ketersediaan pasar pada daerah tertentu maka kestabilan harga yang wajar pada tingkat petani juga dapat dijaga.

Inisiatif program kerja sama perdagangan antardaerah dalam rangka mendorong terwujudnya stabilitas harga mulai diinisiasi oleh beberapa daerah pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Pemda DKI Jakarta sebagai daerah konsumen yang membutuhkan pasokan komoditas pangan dari daerah lain telah menginisiasi kerja sama perdagangan dengan provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lampung. Namun, hingga saat ini, belum banyak Pemda yang memiliki inisiatif untuk menginisiasi pengembangan kerja sama perdagangan antardaerah. Sejauh ini, praktek aktivitas perdagangan antardaerah masih sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar yang dilakukan oleh para pedagang/pebisnis lokal. Ke depan, kerja sama antardaerah dalam rangka mendorong aktifitas perdagangan perlu lebih dioptimalkan.

Upaya pengendalian inflasi akan semakin efektif apabila setiap daerah saling bersinergi satu sama lain. Berbagai langkah koordinasi pengendalian

inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPID sejauh ini telah cukup mampu mencapai tingkat inflasi yang terkendali. Sebagai contoh, pada tahun 2014 meskipun terjadi reformasi subsidi energi yang ditandai dengan peningkatan harga BBM, namun dampak kenaikan harga BBM tersebut dapat diminimalkan. Hal ini tercermin pada lebih rendahnya realisasi inflasi di tahun 2014 (8,36%) dibanding tahun 2013 (8,38%).²⁹

Relatif lebih terkendalinya inflasi tidak terlepas dari peran aktif daerah yang semakin kuat dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat, khususnya melalui upaya memperkuat sisi produksi pangan dan menjaga kelancaran distribusi. Berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh TPID mulai menyentuh persoalan struktural yang perlu diatasi segera demi lebih terjaminnya stabilitas harga, seperti masalah tata niaga produk pangan dan upaya memperluas akses pasar melalui penguatan kerja sama perdagangan antardaerah. Upaya yang telah ditempuh oleh Pokjanas TPI dan TPID di berbagai daerah melalui komunikasi secara intensif kepada publik di berbagai media komunikasi mampu mengelola ekspektasi inflasi masyarakat sesuai yang diharapkan.

Ke depan tantangan pengendalian inflasi akan semakin besar. Permasalahan struktural yang dihadapi seperti kapasitas produksi dalam negeri yang terbatas, kebijakan perdagangan dan tata niaga yang belum efisien, struktur pasar yang kurang kompetitif khususnya bahan pangan, serta keterbatasan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia harus segera diatasi. Oleh karena itu, kedepan peran TPID perlu semakin diperkuat. Tingkat kesadaran dan komitmen daerah di dalam TPID adalah aspek yang paling penting bagi pengembangan TPID di daerah itu sendiri. Keterlibatan Kepala Daerah secara aktif di dalam TPID tidak hanya akan memberikan dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih keras, namun yang lebih penting adalah mampu mensinergikan kebijakan yang dibangun secara parsial atau sektoral. Karakteristik daerah yang beraneka ragam dengan permasalahan dan tantangan di setiap daerah yang berbeda-beda, secara tidak langsung berimplikasi pada program dan aktivitas TPID di daerah yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi persoalan struktural perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui kontribusi TPID yang semakin konkrit.

²⁹ Disebutkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2014 Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (POKJANAS TPID).

DAFTAR PUSTAKA

- Aisen, A. & Veiga, F.J. (2006). “Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data Analysis.” *Journal of Money, Credit and Banking* 38(5), 1379–1389.
- Anugrah, Donni Fajar (2012), ‘The Long and Short-term Determinants of Inflation in Indonesia’s Regions’, http://www.jsrsai.jp/Annual_Meeting/PROG_49/Resume3/fC06-2%20Donni%20F.%20Anugrah.pdf
- Arimurti, Trinil.; Permata, Meily Ika., & Kurniati, Ina Nurmalia (2012), ‘Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Inflasi’, *Catatan Riset DKM* No. 14/6/DKM/BRE/Cat.
- Bank Indonesia (2015). “Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Oleh Gubernur Bank Indonesia”. Disampaikan dalam Rakornas VI TPID di Jakarta 27 Mei 2015.
- Bank Indonesia (2014). “Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia”. Departemen Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Moneter.
- Boediono. 1998. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Cadarajat, Yayat; Permata, Meily Ika & Prasmuko, Andry., (2008), ‘Apakah Kenaikan Upah Meningkatkan Inflasi ?’, *Working Paper Bank Indonesia* No. WP/03/2008
- Domac, Ilker & Yucel, Eray M. (2004), ‘What Triggers Inflation in Emerging Market Economies?’ *World Bank Policy Research Working Paper* No. 3376.
- Fischer, S., 1993. “The Role of Macroeconomic Factors in Economic Growth”, *Journal of Monetary Economics*, vol. 32, pp. 485-512.
- Gerlach, Stefan & Tillman, Peter (2011), ‘Inflation Targeting and Inflation Persistence in Asia –Pacific’ *Hongkong Institute for Monetary Research Working Paper* No. 25/2011.
- Hossain, Akhtar (2005), ‘The Sources and Dynamics of Inflation in Indonesia: An ECM Model Estimation’. *Journal of Applied Econometrics and International Development*. AEID. Vol. 5-4 (2005)

- Hutabarat, A.R. (2005), 'Mengapa Inflasi Indonesia Lebih Tinggi dari Inflasi Negara Tetangga?', Catatan Riset, Bank Indonesia, No 7/50/DKM/BRE/Cat.
- Hutabarat, A.R. (2005), 'Determinan Inflasi Indonesia', Occasional Paper, Bank Indonesia No. OP/06/2005.
- Ito, Takatoshi & Sato, Kiyotaka (2006), 'Exchange Rate Changes and Inflation in Post-Crisis Asian Economies : VAR Analysis of The Exchange Rate Pass Through' National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12395
- Kurniati, Yati (2007), 'Exchange Rate Pass Through in Indonesia', Working Paper Bank Indonesia No. WP/09/2007
- Listiani, N 2006, 'Faktor-faktor Determinan yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1970-2004', Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 14, No. 1, pp. 42-73.
- Mankiew, Gregory (2012), 'Principles of Macroeconomics'. South-Western Cengage Learning, USA.
- Mohanty, M.S. & Klau, Marc (2001), 'What Determines Inflation in Emerging Market Economies ?'. BIS Paper No. 8.
- Pokjanas TPID (2014). "Buku Petunjuk TPID". Kelompok Kerja Nasional TPID Maret 2014.
- Pokjanas TPID (2014). Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2014 Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (POKJANAS TPID)
- Prastowo, N.J. (2008), 'Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya Terhadap Inflasi', Working Paper, Bank Indonesia, No. WP/07/2008.
- Quah, Danny & Vahey, Shaun P. (1996), 'Measuring Core Inflation' The Economic Journal, Vol. 105, No. 432. (Sep., 1995), pp. 1130-1144.
- Ramakhrisnan, Uma & Vamvakidis, Athanasios., 'Forecasting Inflation in Indonesia' International Monetary Fund Working Paper No. WP/02/2011
- Ridhwan, Masagus M., Werdaningtyas, Hesti & Grace, Melva Viva., (2013), 'Dinamika dan Heterogenitas Inflasi di Indonesia', Working Paper Bank Indonesia No. WP/06/2013.

- Roger, S. (1998). "Core Inflation: Concepts, Uses and Measurement" Discussion Paper G98/9 Reserves Bank of New Zealand.
- Rumbaugh, Thomas (2012), 'Indonesia Sustaining Growth During Global Volatility' International Monetary Fund.
- Suseno dan Astiyah, Siti (2009), 'Inflasi', Buku Seri Kebanksentralan PPSK-BI,
- Siregar, R. and Rajaguru, G. (2002), "Base Money and Exchange Rate: Sources of Inflation in Indonesia During the Post-1997 Financial Crisis", Policy Discussion Paper No. 02/21, Center for International Economic Studies, University of Adelaide.
- Tjahjono, Endy D., Hutabarat, Akhis & Haryono, Erwin., (2000). "Pengukuran Inflasi Inti (Core Inflation) di Indonesia" Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (BEMP) Bank Indonesia edisi Maret 2000.
- Utari, G A. Diah & Nurliana , Linda P. (2012), 'Dampak Kenaikan Tarif Tenaga Listrik Terhadap Inflasi', Catatan Riset DKM No. 14/5/DKM/BRE/CR
- Vinayagathan, Thanabalasingam (2013), 'Inflation and Economic Growth : A Dynamic Panel Threshold Analysis for Asian Economies', Journal of Asian Economies Vol. 26, page 31-41
- Wimanda, Rizki., Prasmuko, Andri & Oktiyanto, Fajar (2011). 'Karakteristik Inflasi Indonesia: Sebuah Rangkuman Studi yang Komprehensif dan Pelajaran yang Dapat Dipetik' Occasional Paper, Bank Indonesia No. OP/04/2011.
- Wimanda, Rizki E., Turner, Paul M., & Hall, Maximilian J.B. (2011), 'Expectations and The Inertia Of Inflation : The Case of Indonesia' Journal of Policy Modelling No. 22 pp. 426-438
- Yanuarti, T. (2007), 'Has Inflation Persistence in Indonesia Changed?', *Working Paper*, Bank Indonesia, No. WP/10/2007.